

SKRIPSI

***FLYPAPER EFFECT* PADA BELANJA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2012-2023**

Oleh:

**ANI YUSMITASARI
NPM. 2103010007**



**Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1447 H / 2025 M**

***FLYPAPER EFFECT* PADA BELANJA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2012-2023**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh:

ANI YUSMITASARI
NPM. 2103010007

Pembimbing: Putri Swastika, M.I.F, Ph.D.

Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1447 H / 2025 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 Alingmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk dimunaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Jurai Siwo Lampung
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Ani Yusmitasari
NPM : 2103010007
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul : FLYPAPER EFFECT PADA BELANJA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2012-2023

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, 23 Juni 2025
Dosen Pembimbing



Putri Swastika, M.IF., Ph.D
NIP. 198610302018012001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : FLYPAPER EFFECT PADA BELANJA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2012-2023

Nama : Ani Yusmitasari

NPM : 2103010007

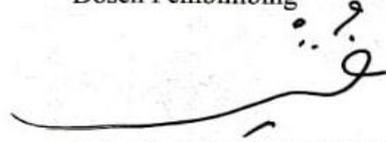
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Prodi : Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Sudah dapat kami setujui untuk disidangkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung.

Metro, 23 Juni 2025
Dosen Pembimbing



Putri Swastika, M.IF., Ph.D
NIP. 198610302018012001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15 Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website. www.metrouniv.ac.id E-mail iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-1558 / 1 n-28.3 / D / PP-00.9 / 07 / 2025

Skripsi dengan Judul: *FLYPAPER EFFECT* PADA BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2012-2023, disusun oleh: Ani Yusmitasari, NPM: 2103010007, Program Studi Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Kamis, 26 Juni 2025.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Putri Swastika, M.I.F., Ph.D.

Penguji I : Yuyun Yunarti, M.Si.

Penguji II : Dr. Diana Ambarwati, M.E.Sy.

Sekretaris : Hanna Hilyati Aulia, M.Si.



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Dri Santoso, M.H

NIP. 196703161995031001

ABSTRAK

***FLYPAPER EFFECT* PADA BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2012-2023**

Oleh:
ANI YUSMITASARI

Belanja daerah merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di daerah tersebut. Melalui dana dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU), Pemerintahan daerah dapat melakukan pembelanjaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dalam jangka panjang PAD dan DAU terhadap belanja daerah, serta untuk mengetahui adanya *flypaper effect* pada belanja daerah.

Data penelitian menggunakan estimasi data time series pada Kabupaten Lampung Timur selama 12 tahun yaitu tahun dari 2012 – 2023, yang diperoleh dari Laporan Realisasi PAD, DAU, dan Belanja Daerah yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) RI. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Metode analisis data yang awal digunakan adalah *Vector Error Correction Model* (VECM) yang diolah dengan program *E-Views* 13. Setelah dilakukan analisis data diketahui tidak adanya kointegrasi, sehingga metode VECM secara alternatif diubah pada metode VAR (*Vector Autoregression*) pada data yang sudah stasioner (*first differences*) yang kemudian interpretasi hasilnya akan fokus pada hubungan kausalitas jangka pendek.

Hasil dari penelitian ini secara parsial menunjukkan bahwa $D(X_1)$ (PAD) terhadap $D(Y)$ (Belanja Daerah) nilai probabilitasnya adalah $(0,0226) < 0,05$ yang artinya ada kausalitas jangka pendek. Sedangkan $D(X_2)$ (DAU) terhadap $D(Y)$ (Belanja Daerah) nilai probabilitasnya adalah $(0,4271) > 0,05$ yang artinya tidak ada kausalitas jangka pendek. Variabel dominan dalam mempengaruhi belanja daerah adalah PAD. Dari hasil analisis *Variance decomposition* nilai PAD (46,67%) pada periode 10, sedangkan untuk DAU nilainya adalah angka (27,59%) di periode-periode selanjutnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi *flypaper effect* pada pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2012-2023.

Kata Kunci: Belanja Daerah, PAD, DAU, *Flypaper Effect*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ani Yusmitasari

NPM : 2103010007

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian peneliti kecuali bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebaik-baiknya.

Metro, 23 Juni 2025
Yang Menyatakan,



Ani Yusmitasari
NPM. 2103010007

HALAMAN MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Qs. Al-Hasyr ayat 18)*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbilalamin dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menempuh pendidikan dan menyelesaikan skripsi ini di institut agama islam negeri metro (IAIN). Sebagai ungkapan rasa hormat dan terimakasih, skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Teristimewa untuk kedua orang tua saya, Bapak Amirul dan Ibu Waginem, yang tak pernah berhenti menjadi penyemangat dan sumber kekuatan. Terima kasih atas setiap dukungan, baik moril maupun materi, serta doa tiada henti yang selalu mengiringi langkah saya. Berkat perjuangan dan cinta kasih Bapak dan Ibu, saya bisa sampai di titik ini. Ini semua untuk kalian.
2. Untuk Nenek Payem tercinta, terima kasih tak terhingga atas cinta, kasih sayang, dan doa yang tak pernah lelah mengiringi setiap langkah saya. Untuk kedua kakak perempuan saya, Rini Yusmitasari dan Ana Yusmitasari, yang senantiasa menginspirasi dan tak henti memberikan nasihat terbaik. Dan untuk adikku manis, Aisyah Humaira, senyum hangatmu selalu jadi penyambut terbaik di rumah. Meski mungkin adik belum sepenuhnya mengerti sekarang, Yunda berharap kelak kamu bisa menempuh pendidikan setinggi-tingginya dan meraih kesuksesan yang membanggakan keluarga.
3. Ibu Putri Swastika, M.I.F, Ph.D. selaku Dosen Pembimbing yang bukan hanya membimbing secara akademik, tetapi juga menjadi pengarah, penyemangat, dan motivator yang luar biasa. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, kesabaran, dan perhatian yang ibu berikan selama proses penulisan skripsi ini.

Terima kasih telah mempermudah setiap proses, selalu membuka pintu konsultasi dengan lapang, dan memahami setiap kesulitan yang peneliti hadapi. Ibu bukan hanya membimbing dengan ilmu, tetapi juga dengan hati. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, serta balasan terbaik untuk setiap kebaikan yang ibu berikan.

4. Ani Yusmitasari, ya! diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terimakasih sudah bertahan.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

Penyusunan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd., Kons. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
3. Bapak Muhammad Mujib Baidhowi, M.E. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Ibu Putri Swastika, M.I.F, Ph.D. selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan, serta arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Ibu Dr. Siti Zulaikha, S.Ag., MH. Selaku pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan, masukan, serta arahan.

6. Bapak dan Ibu Dosen serta segenap Civitas Akademika Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.
7. Teman-teman seperjuangan Esy 2021 yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan motivasi.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan Ekonomi Syariah.

Wassalamualaikum, Wr. Wb

Metro, 22 Juni 2025
Peneliti,



Ani Yusmitasari
NPM. 2103010007

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	14
C. Batasan Masalah	14
D. Rumusan Masalah.....	15
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	16
F. Penelitian Relevan	17
BAB II LANDASAN TEORI	22
A. Desentralisasi Fiskal	22
B. Belanja Daerah.....	25
C. Pendapatan Asli Daerah.....	27
D. Dana Alokasi Umum.....	32
E. Flypaper Effect	35
F. Teori Keagenan (Agency Theory)	38

G. Hipotesis Penelitian	39
H. Kerangka Berpikir	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Rancangan Penelitian.....	44
B. Jenis dan Sumber Data.....	44
C. Variabel dan Definisi Operasional Variabel.....	45
D. Teknik Analisis Data.....	46
1. Uji Stasioneritas Data	47
2. Pengujian Lag Optimal	48
3. Uji Stabilitas VAR.....	49
4. Uji Kointegrasi.....	49
5. Uji Kausalitas Granger.....	50
6. Uji VECM.....	51
7. Impulse Response Function (IRF)	51
8. Variance Decomposition (VD).....	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	53
B. Hasil Analisis Data	55
1. Uji Stasioneritas Data	55
2. Pengujian lag optimal	56
3. Uji Stabilitas VAR.....	57
4. Uji Kointegrasi.....	58
5. Uji Kausalitas Granger.....	60
6. Impulse Response Function (IRF)	63
7. Variance Decomposition (VD).....	71
C. Pembahasan	72
1. Pengaruh dalam jangka panjang PAD terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Lampung Timur tahun 2012-2023..	72

2. Pengaruh dalam jangka panjang DAU terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Lampung Timur tahun 2012-2023..	73
3. Fenomena Flypaper Effect Pada Belanja Daerah di Kabupaten Lampung Timur tahun 2012-2023	74
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Realisasi Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2023.....	6
Tabel 1.2	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012- 2023.....	7
Tabel 1.3	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012-2023	8
Tabel 1.4	Realisasi Dana Alokasi Umum Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012-2023	10
Tabel 1.5	Penelitian Relevan	17
Tabel 4.1	Hasil Uji Akar Unit	55
Tabel 4.2	Hasil Panjang Lag Optimal	56
Tabel 4.3	Hasil Stabilitas VAR	57
Tabel 4.4	Hasil Uji Kausalitas Granger	60
Tabel 4.5	Hasil Impulse Response Function (IRF) PAD	63
Tabel 4.6	Hasil Impulse Response Function (IRF) DAU	66
Tabel 4.7	Hasil Impulse Response Function (IRF) Belanja Daerah	68
Tabel 4.8	Hasil Variance Decomposition.....	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir	43
Gambar 4. 1 Peta Wilayah Administratif Kabupaten Lampung Timur	54
Gambar 4. 2 Grafik Hasil Stabilitas VAR	57

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Data Realisasi PAD, DAU, dan Belanja Daerah
- Lampiran 2: Hasil olah data E-Viwes 13
- Lampiran 3: Surat bimbingan (SK Pembimbing)
- Lampiran 4: Surat keterangan bebas pustaka
- Lampiran 5: Surat uji plagiasi
- Lampiran 6: Formulir konsultasi bimbingan skripsi
- Lampiran 7: Daftar riwayat hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beralihnya pola pemerintahan sentralisasi dimasa orde baru ke pola desentralisasi dalam kerangka otonomi daerah di era masa reformasi, telah membawa sejumlah konsep baru ke dalam peta hukum dan pembangunan daerah di Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah akan mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah. Hal ini karena ada kaitannya erat dengan pemberian kekuasaan, kewenangan, dan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan menentukan penggunaan dana dalam melaksanakan urusan-urusan daerahnya yang pembiayaannya itu bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Otonomi daerah awalnya diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Kedua undang-undang ini kemudian diperbarui oleh UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004, menjelaskan tentang pemberian kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan dan pemerintahan daerahnya tanpa bertentangan dengan kebijakan dan dasar negara Indonesia. Tujuan otonomi daerah adalah untuk memastikan bahwa setiap daerah dapat menjalankan pemerintahan dan pembangunannya secara mandiri. Ini karena daerah dinilai lebih memahami kondisi wilayahnya sendiri,

sehingga pembangunan dapat difokuskan pada kebutuhan dan potensi spesifik yang dimiliki masing-masing daerah.¹

Dalam pelaksanaan pembangunan tidak terlepas dari pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang merupakan suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam rangka kesatuan. Dana perimbangan menjadi aspek penting dalam hubungan keuangan pusat dan daerah, sekaligus menjadi sumber pendapatan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana ini bertujuan untuk mendukung pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangannya dan mencapai tujuan otonomi daerah, terutama untuk peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan Penerapan UU Nomor 25 Tahun 1999 yang sudah disempurnakan oleh Undang-Undang UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dalam mengawali era desentralisasi di bidang fiskal menjelaskan bahwa sumber-sumber penerimaan pelaksanaan pemerintah daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.²

Sumber penerimaan daerah seperti pendapatan asli daerah dan dana perimbangan merupakan sumber utama yang mendukung dalam pembangunan suatu daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang

¹ Elita Herlina, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Daerah Serta Dampaknya Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Berau," *Jurnal Ekonomika Bisnis* 4, no. 1 (2013): 26.

² Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004>.

diperoleh dari sumber-sumber yang berasal dari potensi daerah itu sendiri, yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan asli daerah sangat berperan penting dalam mengukur kinerja keuangan daerah dan kemandirian daerah, karena salah satu indikator kemandirian suatu daerah dapat diukur melalui peningkatan PAD tiap tahunnya. Semakin besar kontribusi yang diberikan oleh PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maka dapat menunjukkan bahwa semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.³

Dana perimbangan terdiri dari tiga jenis, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Namun, diantara ke-tiga jenis dana tersebut, DAU memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dalam penggunaannya terhadap suatu daerah (sifatnya tidak terikat penggunaannya). Ini berbeda dengan dana transfer lainnya seperti DAK yang memiliki peruntukan spesifik dalam penggunaannya. Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membantu mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Dengan demikian, dana ini dapat berperan dalam memperkecil kesenjangan antara wilayah yang maju dengan wilayah yang tertinggal.⁴

³ Ivoni Ike Liando dan Suwardi Bambang Hermanto, "Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Daerah Pada Kabupaten / Kota Jawa Timur," *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 6, no. 6 (2017): 4-8.

⁴ Ambaya, *Ekonomi Keuangan Daerah* (Bandar Lampung: AURA CV.Anugrah Utama Raharja, 2023), 128.

Terdapat dua faktor utama yang menentukan besarnya transfer Dana Alokasi Umum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Faktor pertama adalah kebutuhan daerah, sedangkan faktor kedua adalah kemampuan finansial daerah yaitu kemampuan dasar yang mencerminkan untuk membiayai belanja daerah. Oleh karena itu, daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskalnya kecil akan menerima alokasi DAU yang relatif kecil, sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil tetapi kebutuhan fiskalnya besar akan mendapatkan alokasi DAU yang lebih besar.⁵

Permasalahan utama dalam Dana Alokasi Umum (DAU) seringkali terletak pada perbedaan pemahaman antara pemerintah pusat dan daerah terkait fungsi serta penggunaannya. Pemerintah pusat mengalokasikan DAU untuk mengatasi kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) sebagai upaya pemerataan keuangan antar daerah. Namun, pemerintah daerah kerap memandang dana ini untuk mencukupi kebutuhan daerahnya. Ketidaksesuaian pemahaman ini berpotensi menimbulkan spekulasi bahwa pengeluaran pemerintah daerah merespons perubahan transfer dengan cara yang tidak seimbang, sehingga menunjukkan adanya *flypaper effect*.⁶

Istilah *flypaper effect* pertama kali diperkenalkan oleh Courant, Gramlich, dan Rubinfeld pada tahun 1997, dengan jargon “*Money Sticks Where It Hits*”, yang mempunyai makna efek kertas lalat. Maimunah dalam Utami menyatakan bahwa *flypaper effect* disebut sebagai keadaan yang terjadi ketika pemerintah daerah memiliki respons belanja yang lebih besar saat

⁵ *Ibid.*, 101–102.

⁶ Nur Isna Inayati dan Doddy Setiawan, “Fenomena Flypaper Effect Pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* 1, no. 2 (2012): 222.

menggunakan dana transfer dari pemerintah pusat yaitu DAU, daripada ketika menggunakan PAD. Ciri paling mendasar terjadinya *flypaper effect* adalah ketika pengaruh (nilai koefisien) DAU terhadap Belanja Daerah lebih besar daripada pengaruh PAD, dan keduanya sama-sama signifikan, adanya perilaku asimetris dari pemerintah daerah, dan ketergantungan pada dana transfer pusat.⁷

Maka dari itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan APBD yang dikelola dengan baik dan efektif. Pemerintah daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja daerah secara optimal, karena belanja daerah merupakan salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Belanja daerah merupakan pengeluaran anggaran daerah untuk pembelian aset tetap dan aset lainnya yang berfungsi untuk mendukung dalam mendanai segala urusan pemerintah daerah selama periode tahun anggaran tertentu, yang dialokasikan secara adil dan merata sehingga seluruh kelompok masyarakat dapat menikmati manfaatnya tanpa diskriminasi, terutama dalam hal pelayanan umum.⁸

Berikut ini adalah data Realisasi pengeluaran belanja daerah di Provinsi Lampung lima tahun terakhir.

⁷ Sagita Utami dan Deden dinar iskandar, "Flypaper Effect Terhadap Determinan Belanja Daerah Dan Determinan Pendapatan Asli Daerah Pada 34 Provinsi Di Indonesia Tahun 2013-2018 (*Two Stage Least Square*)," *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* 3, no. 3 (2020): 45-47.

⁸ Siktania Maria Dilliana dan Henrikus Herdi, *Manajemen Keuangan Daerah* (Eureka Media Aksara, 2022), 20.

Tabel 1.1
Realisasi Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2023

Wilayah	Realisasi Belanja Daerah Provinsi Lampung				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Lampung Barat	1.126.018.591.759	984.638.003.139	1.025.317.695.528	1.081.589.995.536	984.409.205.394
Kab. Lampung Selatan	2.148.229.745.788	2.228.113.954.222	2.167.992.801.149	2.265.773.323.201	2.158.310.960.264
Kab. Lampung Tengah	2.529.103.615.744	2.469.976.394.420	2.546.800.514.903	2.617.973.753.751	2.513.744.798.134
Kab. Lampung Utara	1.676.300.350.023	1.652.448.703.367	1.623.076.061.908	1.737.331.548.987	1.585.612.203.978
Kab. Lampung Timur	2.086.664.488.096	2.129.425.889.847	2.194.372.035.257	2.064.320.644.252	2.096.191.300.838
Kab. Tanggamus	1.678.742.417.519	1.648.643.730.414	1.658.185.016.498	1.723.897.921.886	1.566.610.635.144
Kab. Tulang Bawang	1.190.187.623.366	1.157.855.922.944	1.181.499.024.243	1.723.897.921.885	1.306.563.383.478
Kab. Way Kanan	1.401.165.789.733	1.239.242.856.856	1.224.586.167.296	1.298.465.949.488	1.347.023.503.693
Kota Bandar Lampung	2.190.661.163.233	2.127.497.164.302	2.018.391.119.974	2.273.619.562.000	2.277.717.412.233
Kota Metro	904.564.346.213	946.931.500.656	928.078.024.222	919.301.961.849	983.340.271.533
Kab. Pesawaran	1.269.927.474.221	1.275.887.434.820	1.230.468.597.291	1.263.091.522.281	1.227.608.811.607
Kab. Pringsewu	1.193.779.078.994	1.168.097.521.620	1.266.958.117.285	1.210.975.533.779	1.192.339.898.255
Kab. Mesuji	899.657.609.867	822.017.898.511	873.342.765.606	879.395.034.244	861.104.570.554
Kab. Tulang Bawang Barat	958.598.512.942	939.564.357.427	936.932.957.645	840.783.581.155	789.871.861.301
Kab. Pesisir Barat	818.269.505.936	837.530.914.781	815.809.495.190	768.630.116.995	768.956.085.337
Provinsi Lampung	7.058.713.889.024	6.967.358.448.182	7.097.651.401.591	6.786.374.070.612	7.048.993.246.382

Sumber: DJPK Kemenkeu RI Diakses Pada 20 Desember 2024

Berdasarkan data yang bersumber dari Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan pada tabel di atas, belanja daerah di Provinsi Lampung selama lima tahun terakhir dari tahun 2019-2023 mengalami kenaikan dan penurunan. Perkembangan suatu daerah juga dinilai dari belanja yang digunakan, dimana belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 31 ayat (1) dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dengan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁹

Provinsi Lampung sendiri terdiri dari 14 kabupaten dan 1 kota. Pada tahun 2023, Kabupaten Lampung Timur menempati urutan ke-empat tertinggi

⁹ Ambaya, *Ekonomi Keuangan Daerah.*, 50.

dalam belanja daerah, dengan total Rp2.096.191.300.838. Tingginya angka belanja ini erat kaitannya dengan kebijakan fiskal pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran untuk mencapai tujuan pembangunan.

Tabel dibawah ini menunjukkan belanja daerah Kabupaten Lampung Timur dari tahun 2012 sampai 2023.

Tabel 1.2
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012-2023

Tahun	Belanja Daerah
2012	1.248.733.644.646
2013	1.410.275.163.144
2014	1.512.492.030.233
2015	1.733.408.499.652
2016	1.922.657.369.456
2017	1.947.368.023.838
2018	2.002.789.116.452
2019	2.086.664.488.096
2020	2.129.425.889.847
2021	2.194.372.035.257
2022	2.064.320.644.252
2023	2.096.191.300.838

Sumber: DJPK Kemenkeu RI Diakses Pada 20 Desember 2024.

Realisasi belanja daerah Kabupaten Lampung Timur terus meningkat dari tahun 2012 sampai 2021. Peningkatan kegiatan pemerintahan turut mendorong kenaikan belanja daerah setiap tahunnya. Belanja tertinggi tercatat pada tahun 2021 sebesar Rp2.194.372.035.257, yang mencakup belanja langsung dan tidak langsung. Namun, pada tahun 2022 belanja daerah mengalami penurunan menjadi Rp2.064.320.644.252. Data ini menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah Kabupaten Lampung Timur mengalami fluktuasi. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu lebih fokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai pengeluaran

belanja daerah. Fluktuasi tersebut juga menandakan pentingnya upaya berkelanjutan dalam menggali potensi ekonomi lokal dan mengurangi ketergantungan pada sumber pendapatan dari pusat.

Kabupaten Lampung Timur harus terus berupaya memanfaatkan berbagai potensi sumber daya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, yang pada akhirnya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD sendiri merupakan wujud partisipasi langsung masyarakat dalam pembangunan daerah, melalui pembayaran pajak, retribusi, dan sumber-sumber lainnya. Oleh karena itu, masyarakat berhak mendapatkan timbal balik berupa pembangunan yang layak dari pemerintah daerah.

Berikut tabel di bawah ini menunjukkan data realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2012-2023.

Tabel 1.3
Realisasi PAD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012-2023

Tahun	PAD
2012	49.362.536.451
2013	40.476.211.275
2014	83.131.971.570
2015	84.496.936.514
2016	94.924.247.670
2017	111.886.192.444
2018	125.035.523.317
2019	147.527.535.828
2020	157.810.377.070
2021	158.378.912.073
2022	195.574.745.737
2023	196.136.238.928

Sumber: DJPK Kemenkeu RI Diakses Pada 20 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Timur menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2012 hingga 2023, meskipun

sempat mengalami penurunan pada tahun 2013. Penurunan PAD di tahun 2013 tersebut salah satunya disebabkan oleh merosotnya penerimaan retribusi daerah. Ada perbedaan yang sangat drastis antara pencapaian retribusi daerah pada tahun 2012 dan 2013. Pada tahun 2012, penerimaan retribusi berhasil melampaui target hingga 321%. Namun, di tahun 2013, penerimaan retribusi justru tidak mencapai target, hanya terealisasi sebesar 78,05%. Kondisi ini tentu berimplikasi pada penurunan total PAD Kabupaten Lampung Timur di tahun 2013.¹⁰ Melemahnya PAD, khususnya dari retribusi, menjelaskan mengapa pada tahun 2013 penerimaan dana transfer (Dana Alokasi Umum/DAU) dari pemerintah pusat lebih mendominasi dibandingkan PAD itu sendiri.

Selanjutnya pada tahun 2014, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Timur mengalami kenaikan yang cukup positif dan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh dominasi penerimaan dari Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan pembagian hasil pajak provinsi pada tahun tersebut. Secara spesifik, pendapatan asli daerah dari PPJ meningkat menjadi Rp11,3 miliar pada tahun 2014, melampaui target awal sebesar Rp10 miliar. Selain PPJ, penyumbang PAD terbesar lainnya bersumber dari pembagian hasil pajak provinsi, di antaranya Pajak kendaraan bermotor, PNKB, dan pajak air permukaan yang totalnya mencapai Rp20

¹⁰ Hidayanti, Skripsi: "Efektivitas Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Retribusi Izin Trayek Di Kabupaten Lampung Timur" (Bandung: Universitas Padjadjaran Bandung, 2017), 5.

miliar. Potensi pendapatan lain juga berasal dari berbagai Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Lampung Timur.¹¹

Namun disisi lain, hingga saat ini pendapatan daerah Kabupaten Lampung Timur masih sangat bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat. Ketergantungan ini tercermin dari realisasi Dana Alokasi Umum Kabupaten Lampung Timur yang juga terus meningkat setiap tahunnya.

Berikut tabel di bawah ini menunjukkan data realisasi Dana Alokasi Umum Kabupaten Lampung Timur dari tahun 2012 hingga 2023.

Tabel 1.4
Realisasi DAU Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012-2023

Tahun	DAU
2012	763.748.797.000
2013	860.136.385.000
2014	940.041.243.000
2015	974.792.193.000
2016	1.081.165.467.000
2017	1.062.555.526.000
2018	1.069.168.109.000
2019	1.106.577.701.000
2020	1.007.072.973.000
2021	1.029.485.339.000
2022	987.195.089.258
2023	1.077.274.703.452

Sumber: *DJPK Kemenkeu RI Diakses Pada 20 Desember 2024.*

Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima Kabupaten Lampung Timur terus meningkat dari tahun 2012 hingga 2021, dengan puncak transfer dana dari pemerintah pusat terjadi pada tahun 2019 sebesar Rp 1.106.577.701.000.

¹¹ Heru Setyawan, "PAD Lampung Timur Didominasi Pajak Penerangan Jalan," ANTARA, n.d., <https://lampung.antaranews.com/berita/275780/pad-lamtim-didominasi-pajak-penerangan-jalan>.

Namun, DAU ini mengalami penurunan pada tahun 2022. Penurunan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perubahan kebijakan fiskal, prioritas belanja pemerintah pusat, kondisi ekonomi, evaluasi kinerja daerah, dan dampak pandemi COVID-19.

Berdasarkan penjelasan diatas, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Timur dari tahun 2012 sampai 2023 menunjukkan bahwa baik Belanja Daerah, PAD, dan DAU sama-sama mengalami peningkatan. Namun, peningkatan PAD tampaknya tidak berjalan selaras dengan peningkatan DAU yang diterima. Lebih lanjut lagi, pada tahun 2013 ketika PAD mengalami penurunan, kemudian DAU mengalami kenaikan, justru belanja daerah juga ikut naik. Pola serupa namun terbalik terjadi pada tahun 2022 yaitu, ketika PAD naik dan DAU turun, belanja daerah justru ikut turun.

Kondisi ini menyiratkan bahwa laju peningkatan DAU lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan PAD. Ini jelas mengindikasikan bahwa Kabupaten Lampung Timur masih memiliki tingkat ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Selain itu, ada indikasi bahwa pemerintah daerah cenderung lebih responsif dalam meningkatkan belanja daerah saat terjadi peningkatan DAU, dibandingkan saat terjadi peningkatan PAD.

Hal inilah yang menjadi permasalahan mendasar dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu alokasi transfer yang berpotensi menimbulkan ketergantungan fiskal. Daerah menjadi semakin bergantung pada dana transfer dari pusat dan kurang optimal dalam menggali potensi Pendapatan Asli

Daerah (PAD). Idealnya, pemberlakuan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal seharusnya berjalan seiring dengan peningkatan PAD sebagai wujud kemandirian fiskal daerah. Sedangkan berdasarkan data menjelaskan bahwa daerah masih bergantung dengan dana bantuan transfer dari pemerintah pusat, situasi ini membuka peluang terjadinya fenomena *flypaper effect*.

Oleh karena itu, penelitian mengenai *flypaper effect* pada belanja daerah sangat urgen dilakukan. Hal ini penting karena beberapa alasan fundamental yang terkait dengan efisiensi alokasi anggaran, akuntabilitas fiskal, dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Jika pemerintah daerah terlalu bergantung pada dana transfer (DAU) dibandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri, dapat timbul masalah seperti ketergantungan berlebihan, pemborosan anggaran, celah fiskal yang lebih besar, dan peningkatan ketimpangan antar daerah.

Flypaper effect merupakan fenomena dalam penelitian ini. Maimunah menyatakan bahwa *Flypaper effect* disebut sebagai keadaan yang terjadi ketika pemerintah daerah memiliki respons belanja yang lebih besar saat menggunakan dana transfer dari pemerintah pusat yaitu DAU, daripada ketika menggunakan PAD.¹² Diperkuat oleh Penelitian yang dilakukan oleh Sri Handayani dan Saifudin yang berjudul “*Flypaper Effect* Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Belanja Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2015-2016” yang secara empiris membuktikan bahwa besarnya belanja daerah dipengaruhi oleh jumlah DAU yang diterima dari

¹² Sagita Utami dan Deden dinar iskandar, “Flypaper Effect Terhadap Determinan Belanja Daerah Dan Determinan Pendapatan Asli Daerah Pada 34 Provinsi Di Indonesia Tahun 2013-2018 (*Two Stage Least Square*),” 47.

pemerintah pusat. Kemudian penelitian yang dilakukan Dila Masyitah “Analisis *Flypaper Effect* Pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Aceh tahun 2018-2022”, menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah di Provinsi Aceh.

Ada beberapa pertimbangan dalam memilih Kabupaten Lampung Timur sebagai lokasi penelitian ini. Pertama, Lampung Timur menduduki peringkat ke-empat dengan belanja daerah tertinggi di Provinsi Lampung. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam kegiatan pemerintahan, yang didukung oleh data laporan realisasi belanja daerah dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) RI. Kedua, terdapat indikasi ketergantungan dana dari pemerintah pusat serta kesenjangan (*gap*) antara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum pada tahun 2013 dan 2022. Terakhir, belum ada penelitian mengenai *flypaper effect* yang secara spesifik menjadikan Kabupaten Lampung Timur sebagai lokasi, sehingga penelitian ini diharapkan dapat menyajikan data dan informasi baru yang berkontribusi bagi peneliti selanjutnya.

Berdasarkan uraian di atas, yang mengindikasikan adanya permasalahan ketergantungan fiskal dan potensi *flypaper effect* di era otonomi daerah, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai “***Flypaper Effect* Pada Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012-2023**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka timbulah beberapa masalah yang diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah yang kurang memaksimalkan potensi daerahnya, sehingga ini akan berdampak pada Pendapatan Asli Daerah yang masih sedikit.
2. Laju dana perimbangan yang diperoleh dari pemerintah pusat yaitu DAU yang semakin tinggi, jika hal tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan PAD yang selaras maka hal ini dapat menimbulkan ketergantungan pemerintah daerah akan dana dari pemerintah pusat.
3. Terjadi perbedaan pemahaman mengenai fungsi dan penganggaran antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam pengelolaan DAU.
4. Semakin besar DAU terhadap belanja daerah daripada dengan PAD, maka akan menimbulkan terjadinya fenomena *flypaper effect*.
5. Kabupaten Lampung Timur menempati urutan ke-empat tertinggi dengan jumlah belanja daerah mencapai Rp2.096.191.300.838
6. Adanya gab pada pengelolaan anggaran yang terjadi pada tahun 2013 dan 2022 di Kabupaten Lampung Timur.

C. Batasan Masalah

Guna memperjelas ruang lingkup masalah yang akan dibahas dan agar penelitian dilaksanakan secara fokus maka terdapat batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

Penelitian ini dilakukan berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan dari pemerintah pusat terhadap belanja daerah. Fokus utama penelitian ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU). DAU dipilih karena memiliki fleksibilitas tinggi dalam penggunaannya oleh daerah (tidak terikat peruntukan), berbeda dengan dana transfer lain seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) yang memiliki peruntukan spesifik.

Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, serta untuk mengetahui fenomena *Flypaper Effect* pada Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Lampung Timur dari tahun 2012-2023 atau dalam rentan waktu 12 tahun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai variabel X (independen) dan Belanja Daerah sebagai variabel Y (dependen). Fokus pada penelitian ini yaitu dengan melibatkan variabel Pendapatan Asli Daerah dengan mengambil (angka realisasi PAD), Dana Alokasi Umum dengan mengambil (angka realisasi DAU), dan Belanja Daerah dengan mengambil (angka realisasi belanja).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh dalam jangka panjang terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Lampung Timur tahun 2012-2023?
2. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh dalam jangka panjang terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Lampung Timur tahun 2012-2023?

3. Apakah terjadi fenomena *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah di Kabupaten Lampung Timur tahun 2012-2023?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah dalam jangka panjang terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Lampung Timur tahun 2012-2023.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum dalam jangka panjang terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Lampung Timur tahun 2012-2023.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis fenomena *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah di Kabupaten Lampung Timur tahun 2012-2023.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:

- a. Dapat memberikan informasi dan wawasan kepada pembaca maupun peneliti mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Lampung Timur tahun 2012-2023.
- b. Dari hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya.

- c. Bagi pemerintah dapat menjadi dasar yang bisa digunakan untuk pengambilan kebijakan dalam pengelolaan pengeluaran belanja daerah di Kabupaten Lampung Timur.

F. Penelitian Relevan

Penelitian relevan dapat diartikan sebagai penelitian terdahulu atau penelitian yang memiliki tema dan topik yang berkaitan dengan topik atau judul penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sebagai acuan dalam mempermudah proses penelitian. Berikut ini merupakan penelitian relevan yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini:

Tabel 1. 5 Penelitian Relevan

No	Peneliti, Tahun, Judul	Hasil	Variabel & Indikator	Metodelogi	Novelty
1	Sri Handayani dan Saifudin (2018), <i>Flypaper Effect</i> Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Belanja Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2015-2016.	PAD dan DAU memiliki pengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah serta terjadi fenomena <i>flypaper effect</i> pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.	Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen (Belanja daerah) dan tiga variabel independen (PAD, DAU, dan DAK). Indikator berupa laporan realisasi PAD, DAU, DAK dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode tahun 2015-2016.	Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda menggunakan SPSS versi 20. Populasi penelitian mencakup seluruh pemerintah daerah di Jawa Tengah (kabupaten dan kota). Sampel terdiri dari 34 kabupaten/kota yang menyampaikan laporan jumlah realisasi PAD, DAU, DAK, dan Belanja Daerah di situs Badan Pusat Statistik (BPS)	Objek pada penelitian ini berlokasi di Jawa Tengah, sedangkan penelitian saya berfokus di Lampung Timur. Dari segi periode waktu, penelitian ini menggunakan data tahun 2015-2016, sementara penelitian saya menganalisis periode yang lebih panjang, yaitu 2012-2023. Selain itu, variabel yang digunakan juga berbeda; penelitian ini melibatkan Dana Alokasi Khusus (DAK), sedangkan penelitian saya tidak. Perbedaan penting lainnya

No	Peneliti, Tahun, Judul	Hasil	Variabel & Indikator	Metodelogi	Novelty
				tahun 2015-2016.	terletak pada metode analisis yang digunakan, di mana penelitian ini menggunakan regresi linear berganda, sementara saya menerapkan metode <i>Vector Error Correction Model</i> (VECM).
2	Muz'an Sulaiman (2023), Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap <i>Flypaper Effect</i> Pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat	Secara silmultan (uji F) PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Secara parsial (uji t) PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Nilai koefisien dari Dana Alokasi Umum (1.289751) lebih besar dibandingkan dengan koefisien Pendapatan Asli Daerah (0.337599) yang artinya terjadi fenomena <i>Flypaper Effect</i> pada Belanja Daerah di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2016-2020.	Variabel yang digunakan yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum (independen), serta Belanja Daerah (dependen). Dengan indikator laporan realisasi PAD, DAU dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat selama periode tahun 2016-2020.	Analisis penelitian ini menggunakan Model Regresi Linier Berganda dengan data panel yang dioperasikan dengan program E-Views 10. Data yang dipakai adalah sekunder selama lima tahun (2016-2020), diperoleh dari situs resmi Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat dan Kementerian Keuangan RI. Populasi penelitian ini mencakup pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat, dan sampel yang diambil adalah 14 kabupaten/kota di provinsi tersebut.	Perbedaan utama penelitian ini dengan penelitian saya terletak pada lokasi dan metode analisis data. Penelitian ini berlokasi di Provinsi Kalimantan Barat, menggunakan regresi linier berganda dengan data panel. Sementara itu, penelitian saya berlokasi di Kabupaten Lampung Timur, menggunakan metode analisis VECM dengan data <i>time series</i> . Dari segi periode waktu, penelitian ini menggunakan data tahun 2016-2020, sementara penelitian saya menganalisis periode yang lebih panjang, yaitu 2012-2023.

No	Peneliti, Tahun, Judul	Hasil	Variabel & Indikator	Metodelogi	Novelty
3	Nurjihad Dukumalamo, Jufri Jacob, dan Fajri Hatim (2023), Pengaruh <i>Flypaper Effect</i> di Kota Tidore Kepulauan.	Variabel PAD berpengaruh positif dan signifikan, DAU berpengaruh positif dan signifikan, DAK berpengaruh negatif dan signifikan dan DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, dalam penelitian ini diketahui terdapat <i>flypaper effect</i> .	Penelitian ini menggunakan variabel bebas terdiri atas PAD, DAU, DAK, dan DBH. Adapun variabel terikat adalah Belanja Daerah. Indikator yang digunakan yaitu laporan realisasi PAD, DAU, DAK, DBH, dan Belanja Daerah di Kota Tidore Kepulauan tahun 2018-2022.	Penelitian ini mengadopsi metode deskriptif kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu realisasi PAD, DAU, DAK, DBH, dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan selama periode 2018–2022. Untuk analisis data, penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda.	Novelty antara penelitian ini dan penelitian saya meliputi lokasi objek, metode analisis data, variabel yang dilibatkan, dan rentang waktu penelitian. Penelitian ini berlokasi di Kota Tidore Kepulauan dan menggunakan regresi linier berganda, dengan melibatkan variabel DAK dan DBH dalam rentang waktu 2018-2022 (5 tahun). Sebaliknya, penelitian saya berlokasi di Lampung Timur, menggunakan metode analisis VECM, tidak melibatkan DAK dan DBH, serta mencakup rentang waktu 2012-2023 (12 tahun).
4	Dila Masyitah (2023), Analisis <i>Flypaper Effect</i> Pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah di Provinsi Aceh.	PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah, sedangkan DAK berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Provinsi Aceh. Terjadi fenomena <i>flypaper effect</i> di Provinsi Aceh.	Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen (Belanja daerah) dan tiga variabel independen (PAD, DAU, dan DAK). Indikator yang digunakan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Belanja Daerah, PAD, DAU dan DAK Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh	Metode analisis data yang digunakan adalah regresi data panel dengan pendekatan <i>Fixed Effect Model</i> yang diolah menggunakan <i>eviews 12</i> . Populasi penelitian mencakup seluruh pemerintah daerah di Provinsi Aceh, baik tingkat kabupaten maupun	Dari segi lokasi, penelitian ini dilakukan di Provinsi Aceh (mencakup kabupaten dan kota), sementara penelitian saya berfokus pada Kabupaten Lampung Timur. Durasi waktu juga berbeda; penelitian ini menggunakan data selama 5 tahun,

No	Peneliti, Tahun, Judul	Hasil	Variabel & Indikator	Metodelogi	Novelty
			tahun 2018-2022.	kota. Adapun sampel yang digunakan meliputi 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama periode 2018-2022 yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA).	sedangkan penelitian saya mencakup 12 tahun. Selanjutnya, penelitian ini menguji variabel DAK terhadap belanja daerah, yang tidak menjadi fokus dalam penelitian saya. Dalam hal metode analisis data, penelitian ini menggunakan regresi data panel, sedangkan saya menerapkan VECM. Terakhir, sumber data penelitian ini adalah BPKA, namun penelitian saya secara spesifik menggunakan data dari DJPK RI.
5	Raudhotul Azizah (2021), <i>Flypaper Effect</i> Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2005-2020 Menurut Perspektif Ekonomi Islam	Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah dalam jangka pendek. Namun, dalam jangka panjang, DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah, sedangkan PAD berpengaruh negatif. Tidak terjadi fenomena <i>flypaper effect</i> di Provinsi Lampung.	Penelitian ini menggunakan dua variabel bebas (PAD dan DAU), serta satu variabel terikat (Belanja Daerah). Indikator yang digunakan yaitu laporan realisasi PAD, DAU dan Belanja Daerah di Provinsi Lampung.	Analisis data dilakukan dengan menggunakan <i>Vector Error Correction Model</i> (VECM), yang diolah menggunakan perangkat lunak Eviews 10. Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh pemerintah daerah (kabupaten/kota) di Provinsi Lampung. Sampel penelitian ini yaitu total nilai keseluruhan dari semua kabupaten dan kota di	Objek penelitian ini mencakup Provinsi Lampung, sedangkan penelitian saya berfokus pada Kabupaten Lampung Timur. Selain itu, terdapat perbedaan pada tahun dan periode waktu penelitian yang digunakan. Penelitian ini menganalisis hubungan jangka panjang dan pendek, sementara penelitian saya hanya melihat hubungan jangka

No	Peneliti, Tahun, Judul	Hasil	Variabel & Indikator	Metodelogi	Novelty
				Provinsi Lampung periode 2005-2020 yang bersumber dari DJPK RI.	panjang. Terakhir, penelitian ini menggunakan perspektif ekonomi Islam, sedangkan penelitian saya tidak.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Desentralisasi Fiskal

Teori desentralisasi fiskal memberikan penjelasan mengenai belanja daerah karena, teori ini menekankan pentingnya pelimpahan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya, meningkatkan akuntabilitas publik, dan mendorong pembangunan daerah yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Dalam konteks ini, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menentukan prioritas belanja sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerahnya, serta mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD sebagai sumber pendapatan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah.¹

Teori desentralisasi fiskal yang dikembangkan oleh Oates (1999) menyatakan bahwa alokasi sumber daya yang lebih efisien dan ekonomis akan tercipta dari pengaplikasian desentralisasi fiskal karena pemerintah daerah lebih memahami apa saja kebutuhan daerahnya sendiri.²

1. Pengertian Desentralisasi Fiskal

Pada dasarnya desentralisasi merupakan penyerahan urusan atau wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom.

Desentralisasi fiskal merupakan suatu proses distribusi anggaran dari

¹ Dewi Puspita et al., *Dua Dekade Implementasi Desentralisasi Fiskal Di Indonesia* (Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal, 2021), 10.

² Nina Andriana, "Pengaruh Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Daerah," *Jurnal Pajak Dan Keuangan* 2, no. 1 (2020): 106.

tingkat pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah untuk mendukung fungsi suatu tugas pemerintahan dari pelayanan publik, artinya dengan desentralisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat lokal.³

Menurut Muammil dan Abdurrahman, desentralisasi fiskal dapat diartikan sebagai salah satu mekanisme transfer dana dari APBN dalam kaitannya dengan kebijakan keuangan negara yaitu untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan (*fiscal sustainability*) dan memberikan stimulus terhadap aktivitas perekonomian masyarakat, maka dengan kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan akan menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang sepadan dengan besarnya kewenangan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom.⁴

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola keuangan daerahnya. Daerah diberikan kewenangan dalam menggali sumber-sumber penerimaan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Prinsip dari desentralisasi fiskal tersebut adalah *money follow functions*, dimana Pemerintah Daerah mendapat kewenangan dalam melaksanakan fungsi pelayanan dan pembangunan di daerahnya. Pemerintah Pusat memberikan dukungan dengan menyerahkan sumber-sumber penerimaan kepada daerah untuk dikelola secara optimal agar mampu membiayai daerahnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pemerintah Pusat

³ Rosemery Elsy, *Desentralisasi Fiskal* (Bandung: Alqaprint Jatinangor, 2013), 23.

⁴ Adissya Mega Christia dan Budi Ispriyarso, "Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia," *Jurnal Law Reform* 15, no. 1 (2019): 151.

juga memberikan dana transfer yang dapat dikelola daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tujuannya adalah untuk mengatasi ketimpangan fiskal dengan Pemerintah Pusat dan antar Pemerintah Daerah lainnya. Untuk meminimilaisir ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat melalui dana transfer tersebut, daerah dituntut dapat mengoptimalkan kemampuannya dalam menggali potensi pendapatannya.⁵

2. Tujuan Desentralisasi Fiskal

Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), menjadi titik fundamental desentralisasi di Indonesia. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebutkan, ada empat tujuan besar desentralisasi fiskal Indonesia yaitu:

- a) Desentralisasi fiskal harus memperkuat *local taxing power*. Pemerintah daerah diharapkan semakin dekat dan responsif dengan konstituen untuk membiayai pembangunan wilayahnya.
- b) Mengembangkan hubungan keuangan pusat dan daerah untuk meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal. Pemerintah daerah harus memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan minimal yang sama.

⁵ Proborini Hastuti, "Desentralisasi Fiskal dan Stabilitas Politik Dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia," *Jurnal Simposium Nasional Keuangan Negara*, 2018, 788.

- c) Mengembangkan keleluasaan belanja daerah yang bertanggung jawab untuk mencapai standar pelayanan minimum.
- d) Menciptakan harmonisasi belanja pusat dan daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal.⁶

B. Belanja Daerah

1. Pengertian Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pengertian belanja daerah mencakup semua pengeluaran yang menjadi beban rekening kas umum daerah, mengurangi ekuitas dana lancar yang merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah daerah.⁷

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006, pada pasal 18 menyatakan bahwa belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata sehingga dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa adanya diskriminasi, terutama dalam hal pemberian pelayanan publik. Belanja daerah ini digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota, yang mencakup

⁶ Aprilia Hariani, "Empat Tujuan Besar Desentralisasi Fiskal Indonesia", Dalam <https://www.pajak.com/pajak/empat-tujuan-besar-desentralisasi-fiskal-indonesia/>. Diunduh pada 20 Maret 2025.

⁷ Rosmey Elsy, *Alokasi Keuangan Daerah Berdasarkan Potensi Daerah* (Sumedang: Alqaprint Jatinangor, 2020), 7.

urusan wajib, urusan pilihan serta urusan tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah, atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.⁸

2. Kelompok Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yang telah mengalami perubahan melalui Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan adanya perubahan kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua, belanja daerah dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yaitu:

- a. Belanja langsung, merupakan belanja yang dianggarkan secara langsung terkait dengan program dan kegiatan. Belanja ini mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.
- b. Belanja tidak langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja keuangan, dan belanja tidak terduga.⁹

Maka daripada itu dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan, setiap daerah memerlukan sumber pendapatan yang memadai untuk membiayai berbagai kegiatan belanja daerah. Salah satu sumber pendapatan penting bagi daerah adalah pendapatan asli daerah

⁸ “Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah”, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/126455/permendagri-no-13-tahun-2006>.

⁹ Siktania Maria Dilliana dan Henrikus Herdi, *Manajemen Keuangan Daerah*, 22.

(PAD) yang mendukung kegiatan belanja daerah dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

C. Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah disebut juga dengan PAD, menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, dalam undang-undang tersebut Pendapatan Asli Daerah didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan.¹⁰

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah melalui berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengumpulkan dana demi memenuhi keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatan rutin maupun pembangunannya.¹¹ Sesuai dengan Pasal 3 UU No. 33 Tahun 2004, PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam mendanai pelaksanaan otonomi daerah, sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah sebagai wujud dari desentralisasi. Sumber PAD meliputi

¹⁰ Anak Agung Ngurah Agung Kresnandra, "Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Dana Perimbangan Dan Investasi Swasta Sebagai Variabel Pemoderasi," *Jurnal Bisnis Dan Manajemen* 3, no. 2 (2016): 46.

¹¹ Fitri Amalia, "Analisis Flypaper Effect Pada Belanja Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten," *Jurnal Organisasi Dan Manajemen* 11, no. 1 (2015): 18.

pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber-sumber PAD yang sah lainnya.¹²

Menurut teori yang dikemukakan oleh Wagner pada abad ke-19, bahwa ketika pendapatan per kapita meningkat dalam suatu perekonomian, maka pengeluaran pemerintah juga ikut meningkat.¹³ Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber pendapatan dari daerah itu sendiri yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan berbagai penjelasan mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah yang berasal dari daerah itu sendiri, seperti yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, kemudian dana yang diperoleh dari sumber-sumber tersebut akan dikelola oleh pemerintah daerah dan diatur sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

2. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, bahwa Pendapatan Asli Daerah terdiri atas beberapa sumber diantaranya:

¹² Ambaya, *Ekonomi Keuangan Daerah.*, 121.

¹³ Sagita Utami dan Deden dinar iskandar, "Flypaper Effect Terhadap Determinan Belanja Daerah dan Determinan Pendapatan Asli Daerah Pada 34 Provinsi Di Indonesia Tahun 2013-2018 (*Two Stage Least Square*)," 48.

a. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang pemungutannya menjadi wewenang pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan keuangan daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1, dijelaskan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut sebagai Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang harus dibayarkan oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Terdapat dua jenis pajak, yaitu pajak provinsi dan kabupaten.

Jenis pajak provinsi terdiri dari:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor.
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- 4) Pajak Air Permukaan.
- 5) Pajak Rokok.

Sedangkan untuk jenis pajak kabupaten/ kota terdiri dari:

- 1) Pajak Hotel.
- 2) Pajak Restoran.
- 3) Pajak Hiburan.
- 4) Pajak Reklame.
- 5) Pajak Penerangan jalan.

- 6) Pajak Mineral bukan logam dan batuan.
- 7) Pajak Parkir.
- 8) Pajak Air tanah.
- 9) Pajak Sarang burung walet.
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.¹⁴

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan iuran yang diterima dari masyarakat, atas jasa atau penggunaan berbagai aset daerah. Pemungutan retribusi ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, peraturan pemerintah dan peraturan daerah. Retribusi ini hanya dikenakan apabila terdapat jasa atau fasilitas yang digunakan secara langsung oleh masyarakat, yang memberikan imbalan langsung kepada pembayar dalam bentuk layanan atau manfaat tertentu. Kemudian dana yang terkumpul dari retribusi daerah ini digunakan untuk membiayai pembangunan daerah guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, tentang Pajak dan Retribusi Daerah pemerintah daerah diberi kewenangan untuk memungut tiga objek retribusi, yaitu:

- 1) Retribusi jasa umum.
- 2) Retribusi jasa usaha.
- 3) Retribusi perizinan tertentu.¹⁵

¹⁴ Agoes Kamaroellah, *Pajak Dan Retribusi Daerah* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2019), 217–219.

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan pendapatan yang dihasilkan dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jika pengelolaan ini menghasilkan laba, maka laba tersebut dapat dijadikan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini mencakup:

- 1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
- 2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN.
- 3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.¹⁶

d. Lain-lain PAD yang sah

Merupakan pendapatan asli daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Adapun jenis dari pendapatan ini mencakup:

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- 2) Jasa giro.
- 3) Pendapatan bunga.
- 4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah.

¹⁵ Rosmey Elsy, *Alokasi Keuangan Daerah Berdasarkan Potensi Daerah.*, 202.

¹⁶ Muhamad Rafi Firdaus, Husen Saeful Anwar, dan Ibnu Malik, "Efektivitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2017-2019 Di Kota Bandung," *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 12 (2022): 4130.

- 5) Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.
- 6) Penerimaan ke untungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- 7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- 8) Pendapatan denda pajak.
- 9) Pendapatan denda retribusi.
- 10) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan.
- 11) Pendapatan dari pengembalian.
- 12) Fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- 13) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- 14) Pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan.¹⁷

Selain daripada itu guna membiayai kegiatan belanja daerah, peran dana alokasi umum dari pemerintah pusat juga sangat penting. Dana ini berfungsi untuk mendukung daerah dalam melaksanakan berbagai kegiatan belanja yang diperlukan.

D. Dana Alokasi Umum

1. Pengertian dana Alokasi Umum

Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004, Dana Alokasi umum merupakan dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Tujuan utama dari dana

¹⁷ Rosmey Elyse, *Alokasi Keuangan Daerah Berdasarkan Potensi Daerah.*, 218–219.

ini adalah untuk mendukung pembiayaan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi tanpa ditentukan secara spesifik penggunaannya. Dalam proses pengalokasiannya, Dana Alokasi Umum mempertimbangkan beberapa faktor penting, seperti potensi daerah, luas wilayah, kondisi geografis, jumlah penduduk, serta tingkat pendapatan masyarakat setempat. Dengan demikian, dana ini diharapkan dapat mempersempit kesenjangan antara wilayah yang maju dengan wilayah yang tertinggal.¹⁸

Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu daerah ditentukan oleh besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) yang ada, yaitu selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*) yang dimiliki. Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskalnya kecil akan menerima alokasi DAU lebih kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskal besar akan mendapatkan alokasi DAU relatif besar.¹⁹

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dana alokasi umum adalah dana yang ditransfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah, sebagai salah satu sumber pendapatan penting bagi daerah, terutama bagi daerah yang memiliki PAD rendah.

¹⁸ Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), 200.

¹⁹ Muz'an Sulaiman, "Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Flypaper Effect Pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat," *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan* 6 (2023): 212.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi dana Alokasi Umum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum (DAU) yang akan diterima oleh setiap daerah akan dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain:

- a. Alokasi dasar, yaitu jumlah PNS yang ada di daerah.
- b. Jumlah penduduk yang ada di daerah.
- c. Luas wilayah daerah.
- d. Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan setiap tahun.
- e. Dana Bagi Hasil (DBH) yang diperoleh dari pemerintah pusat setiap tahunnya.²⁰

3. Perhitungan dana alokasi umum

Dana alokasi umum berfungsi untuk menutupi kekurangan/celah yang terjadi akibat kebutuhan daerah yang melebihi potensi penerimaan daerah yang tersedia. Dalam konteks kesenjangan fiskal, besaran Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima oleh kabupaten/kota di seluruh Indonesia ditentukan berdasarkan ketentuan berikut:

- a. Dana alokasi umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
- b. Dana alokasi umum untuk daerah provinsi dan untuk kabupaten/kota ditetapkan sebesar 10% dan 90% dari DAU sebagaimana tersebut di atas.

²⁰ Syahidin dan Abd Jail, "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Aceh Tengah," *Jurnal GPJER* 2, no. 1 (2020): 5.

- c. Dana alokasi umum untuk suatu kabupaten/kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah dana alokasi umum untuk kabupaten/kota yang ditetapkan APBN dengan porsi kabupaten/kota yang bersangkutan.²¹

E. Flypaper Effect

1. Pengertian Flypaper Effect

Menurut Maimunah *Flypaper effect* merupakan keadaan yang terjadi ketika pemerintah daerah memiliki respons belanja yang lebih besar saat menggunakan dana transfer dari pemerintah pusat yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), daripada ketika menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ciri- ciri adanya *Flypaper effect* dapat terlihat dari tingginya koefisien DAU bila dibandingkan dengan PAD dalam hasil pengujian.²² Disisi lain, Solikin mengungkapkan bahwa *flypaper effect* merupakan suatu kondisi dimana pengeluaran daerah dipicu oleh adanya peningkatan dalam jumlah transfer (*unconditional grants*) dari pemerintah pusat dibandingkan dengan perubahan dalam pendapatan daerah.²³

Dari beberapa penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa *Flypaper effect* merupakan sebuah fenomena dimana pemerintah daerah sangat bergantung pada dana bantuan dari pemerintah pusat, namun kurang mampu untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

²¹ Ambaya, *Ekonomi Keuangan Daerah.*, 101.

²² Helmi Melda dan Efrizal Syofyan, "Analisis Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat," *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 2, no. 2 (2020): 2828.

²³ Hilyatul Jannah, "Pengaruh Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah," *Jurnal Ilmu Riset Dan Akuntansi* 9, no. 12 (2020): 4.

miliknya, sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan dalam rasio total pendapatan daerah yang akan digunakan untuk belanja daerah.

2. Indikasi adanya Flypaper Effect

Asumsi mengenai terjadinya *flypaper effect* dalam penelitian ini berfokus pada perbandingan pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah. Menurut Melo dan Venter, terdapat beberapa indikasi yang dapat menunjukkan adanya *flypaper effect*, antara lain:

- a. Ketika pengaruh (nilai koefisien) dari *Unconditional Grant* Dana transfer (DAU) terhadap Belanja Daerah lebih besar daripada pengaruh PAD dan keduanya sama-sama signifikan.
- b. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaruh atau respon PAD terhadap Belanja Daerah tidak signifikan.²⁴

3. Penyebab Flypaper Effect

Menurut teori yang dikemukakan oleh Sagbas dan Saruc, yang menyimpulkan bahwa sumber munculnya gejala *Flypaper Effect* dapat dijelaskan melalui konsep teori *Fiscal Illusion* dan *Bureaucratic Model*.

- a. Teori *fiscal illusion* menjelaskan bahwa *flypaper effect* terjadi akibat kurangnya pengetahuan atau ketidakpedulian masyarakat daerah dalam memahami secara akurat pembiayaan dan pembelanjaan pemerintah. Dalam konteks dana transfer, *Fiscal illusion* menunjukkan bahwa pemerintah sebenarnya menyediakan output

²⁴ Shita Unjaswati Ekawarna, "Analisis Flypaper Effect Pada Belanja Daerah (Studi Komparasi Daerah Induk dan Pemekaran Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi)," *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah* 4, no. 3 (2017): 169.

yang diinginkan oleh masyarakat, namun permintaan mereka terhadap barang publik didasarkan pada kesalahpahaman tentang bagaimana pembiayaan barang publik dan pembagian biaya yang telah ditanggung oleh penduduk. Sebab dalam teori ini menjelaskan bahwa pendapatan pemerintah tidak sepenuhnya transparan atau tidak sepenuhnya dirasakan oleh pembayar pajak, karena pembayar pajak tidak sepenuhnya menyadari pendapatan yang diperoleh pemerintah.

- b. Pada teori *bureaucratic model*, menjelaskan bahwa *flypaper effect* terjadi sebagai hasil dari perilaku birokrat, dalam hal ini adalah pemerintah daerah untuk menggunakan Dana Alokasi Umum yang diterima dari pemerintah pusat untuk belanja daerah dibandingkan dengan meningkatkan sumber-sumber yang mampu menaikkan Pendapatan Asli Daerah.²⁵

4. Dampak flypaper effect

Flypaper effect membawa implikasi yang signifikan, salah satunya adalah peningkatan belanja pemerintah daerah yang melebihi penerimaan transfer itu sendiri. Hal ini juga mencerminkan kecenderungan daerah untuk lebih mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat dibandingkan dengan mengelola sumber daya daerah sendiri. Secara implisit, terdapat beberapa dampak yang muncul akibat terjadinya *Flypaper Effect* pada belanja daerah kabupaten/kota, antara lain:

²⁵ Muhamad Armawaddin, Wali Aya Rumbia, dan Muhammad Nur Afiat, "Analisis Flypaper Effect Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Sulawesi," *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia* 18, no. 1 (2017): 81.

- a. Menyebabkan celah fiskal (*Fiscal gap*) akan tetap ada.
- b. Menimbulkan ketidakmaksimalan dalam pemanfaatan sumber-sumber yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- c. Tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat yang meningkat.
- d. Adanya respon yang berlebihan dalam penggunaan dana transfer dari pemerintah pusat.
- e. Mengakibatkan kurangnya kemampuan untuk mencapai kemandirian keuangan di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.²⁶

F. Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori Agensi pertama kali diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Dalam penjelasannya, Jensen menyebutkan bahwa hubungan agensi terjadi ketika satu orang atau lebih (*principal*) memperkerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang atau mandat dalam pengambilan keputusan. Teori agensi menyatakan bahwa masing-masing pihak hanya termotivasi oleh kepentingannya sendiri sehingga menimbulkan konflik yang terjadi antara *agent* dengan *principal*.²⁷

Teori keagenan juga berlaku di sektor publik, khususnya dalam hubungan antara pemerintah pusat (*principal*) dan pemerintah daerah (*agent*).

²⁶ Rahmatul Mulya dan Bustamam, "Pengaruh Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Banda Aceh (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2008-2014)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* 1, no. 2 (2016): 191–192.

²⁷ Rahima Br Purba, *Teori Akuntansi: Sebuah Pemahaman Untuk Mendukung Penelitian Di Bidang Akuntansi* (Medan: Merdeka Kreasi, 2023), 23.

Pemerintah pusat sebagai *principal* memberikan dana dan wewenang kepada pemerintah daerah sebagai *agent* untuk melaksanakan pembangunan di daerah. Namun, pemerintah daerah sebagai *agent* memiliki maksud tersendiri dalam menggunakan dana tersebut untuk kepentingan sendiri atau kelompok tertentu, bukan untuk kepentingan masyarakat secara luas.²⁸ Pemerintah pusat sebagai *principal* memberikan Dana Alokasi Umum (DAU) kepada pemerintah daerah yang sebagai *agent*. Pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam mengalokasikan anggaran ini, bahkan untuk belanja yang mungkin tidak sejalan dengan preferensi pemerintah pusat. Teori ini membantu untuk memahami apakah pemerintah daerah benar-benar bertindak demi kepentingan masyarakat, atau justru memanfaatkan dana transfer tersebut untuk kepentingan pribadi mereka.

G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan awal untuk pengujian apakah benar atau tidak dengan cara melihat dari hasil analisis penelitian. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah hipotesis yang dirumuskan untuk memberikan jawaban pada permasalahan yang bersifat hubungan (pengaruh).²⁹

1. Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah

Menurut teori yang dikemukakan oleh Wagner pada abad ke-19, bahwa ketika pendapatan per kapita meningkat dalam suatu perekonomian,

²⁸ Riri Zelmianti, "Pendekatan Teori Keagenan Pada Kinerja Keuangan Daerah Dan Belanja Modal (Studi Pada Provinsi di Indonesia)," *JRAK* 7, No. 1 (2016): 12.

²⁹ Syofian Siregar, *Statistika Deskriptif Untuk Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 154.

maka pengeluaran pemerintah juga ikut meningkat.³⁰ PAD yang merupakan sumber pendapatan dari daerah itu sendiri yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan. PAD juga merupakan salah satu sumber belanja daerah, maka peningkatan PAD akan meningkatkan dengan baik dana pemerintah daerah maupun tingkat kemandiriannya, sehingga akan mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan belanja daerahnya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Handayani dan Saifudin yang berjudul “*Flypaper Effect* Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Belanja Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2015-2016”. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap alokasi Belanja Daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat ditarik hipotesis pada penelitian ini yaitu:

- a. H_0 1: tidak terdapat pengaruh dalam jangka panjang variabel X_1 (Pendapatan Asli Daerah) terhadap Y (Belanja Daerah) pada pemerintahan daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2012-2023.
- b. H_a 1: terdapat pengaruh dalam jangka panjang variabel X_1 (Pendapatan Asli Daerah) terhadap Y (Belanja Daerah) pada pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2012-2023.

³⁰ Sagita Utami dan Deden dinar iskandar, “Flypaper Effect Terhadap Determinan Belanja Daerah dan Determinan Pendapatan Asli Daerah Pada 34 Provinsi Di Indonesia Tahun 2013-2018 (*Two Stage Least Square*),” 48.

2. Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan hukum Wagner, yang mengemukakan bahwa pengeluaran pemerintah (belanja daerah) akan bertambah seiring dengan meningkatnya pendapatan per kapita dalam suatu perekonomian. Oleh karena itu, besaran Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai salah satu sumber utama pembiayaan belanja daerah, menjadi krusial dalam mendukung peningkatan aktivitas pembangunan di tingkat lokal, sejalan dengan proyeksi teori Wagner. DAU menuntut pemerintah daerah untuk membangun dan menyejahterakan rakyatnya melalui pengelolaan kekayaan yang proporsional dan profesional, serta membangun infrastruktur yang berkelanjutan, salah satunya melalui pengalokasian anggaran pada sektor belanja daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dila Masyitah dengan judul “Analisis *Flypaper Effect* Pada Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Aceh Tahun 2018-2022”. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat ditarik hipotesis pada penelitian ini yaitu:

- a. H_0 : tidak terdapat pengaruh dalam jangka panjang variabel X_2 (Dana Alokasi Umum) terhadap Y (Belanja Daerah) pada pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2012-2023.

- b. H_{a2}: terdapat pengaruh dalam jangka panjang variabel X₂ (Dana Alokasi Umum) terhadap Y (Belanja Daerah) pada pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2012-2023.

3. Flypaper Effect Terhadap Belanja Daerah

Sumber penerimaan daerah seperti Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum merupakan sumber utama yang mendukung dalam pembangunan suatu daerah. Menurut teori *bureaucratic model*, *flypaper effect* terjadi sebagai hasil dari perilaku birokrat, dalam hal ini adalah pemerintah daerah untuk menggunakan Dana Alokasi Umum yang diterima dari pemerintah pusat untuk belanja dibandingkan dengan meningkatkan sumber-sumber yang mampu menaikkan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muz'an Sulaiman dengan judul "Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap *Flypaper Effect* Pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat". Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi fenomena *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2016-2020, karena respon belanja daerah di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat lebih besar bersumber dari transfer pemerintah pusat yaitu Dana Alokasi Umum dari pada Pendapatan Asli Daerah sendiri.

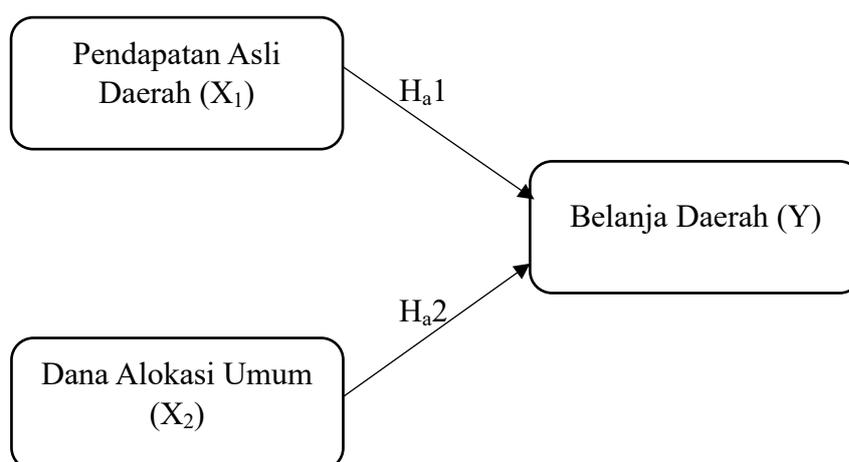
Berdasarkan hal tersebut maka dapat ditarik hipotesis pada penelitian ini yaitu:

- a. H_03 : tidak terjadi fenomena *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah di Kabupaten Lampung Timur tahun 2012-2023.
- b. H_a3 : terjadi fenomena *Flypaper Effect* pada belanja daerah di kabupaten lampung timur tahun 2012-2023.

H. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir ini bertujuan menggambarkan konsep penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sehingga diharapkan dapat menunjukkan alur berpikir dalam menyusun pembahasan ini. Dalam penelitian ini terdiri dari variabel yang mempengaruhi dan variabel yang dipengaruhi, dimana peneliti berusaha mengkaji dan meneliti hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Lampung Timur tahun 2012-2023. Sehingga didapatkan kerangka berfikir seperti berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatif (*causal-comparative*). Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis dan menjelaskan hubungan sebab akibat (kausal) antar variabel dengan menggunakan data numerik dan analisis statistik. Jenis penelitian eksplanatif digunakan untuk menjelaskan bagaimana satu atau lebih variabel independen memengaruhi variabel dependen, dalam hal ini bagaimana pendapatan asli daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) memengaruhi Belanja Daerah, serta menganalisis adanya fenomena *flypaper effect*.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara dan dikumpulkan oleh pihak lain yang tersedia dalam bentuk arsip atau publikasi.¹ Sumber data sekunder ini diperoleh dari publikasi situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RI <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412>, yang mencakup data Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Daerah di Kabupaten Lampung Timur selama kurun waktu 12 tahun terakhir, yaitu mulai dari tahun 2012 hingga 2023. Teknik pengumpulan data

¹ Sidik Priadana dan Denok Sunarsi, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Tangerang: Pascal Books, 2021), 45-47.

yang digunakan adalah studi dokumentasi. Teknik ini melibatkan serangkaian langkah untuk mengumpulkan, mencatat, dan mengolah berbagai data yang relevan dengan topik penelitian.

C. Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Secara singkat variabel adalah segala sesuatu atau obyek yang akan diukur atau dihitung. Variabel penelitian merupakan komponen yang telah ditentukan oleh peneliti untuk diteliti, dengan tujuan memperoleh jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan, yang pada akhirnya akan menghasilkan kesimpulan dari penelitian tersebut.² Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua variabel *independent* yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU), serta satu variabel *dependent* yaitu Belanja Daerah. Variabel *independent* (bebas) merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel *dependent*. Sementara variabel *dependent* (terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi atau terjadi karena adanya variabel bebas. Berikut ini disajikan definisi operasional dari variabel yang digunakan:

1. Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.³ Dalam penelitian ini, belanja daerah mengacu pada total realisasi Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur dari tahun 2012 hingga 2023, yang tercatat dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan

² Syafrida Hanfni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2022), 16.

³ Rosmey Elsy, *Alokasi Keuangan Daerah Berdasarkan Potensi Daerah*, 7.

dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Timur dan dinyatakan dalam triliun rupiah.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan.⁴ Dalam penelitian ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengacu pada nilai total realisasi PAD Kabupaten Lampung Timur dari tahun 2012 hingga 2023, yang tercatat dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Timur dan dinyatakan dalam miliar rupiah.
3. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sejumlah dana yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, tanpa ditentukan secara spesifik penggunaannya.⁵ Dalam penelitian ini, DAU mengacu pada nilai total realisasi DAU Kabupaten Lampung Timur dari tahun 2012 hingga 2023, yang tercatat dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Timur dan dinyatakan dalam triliun rupiah.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah kegiatan analisis pada suatu penelitian yang dikerjakan dengan memeriksa seluruh data dari instrumen penelitian, seperti

⁴Anak Agung Ngurah Agung Kresnandra, "Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Dana Perimbangan Dan Investasi Swasta Sebagai Variabel Pemoderasi," 46.

⁵ Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, 200.

catatan, dokumen, hasil tes, rekaman, dan lain-lain untuk menjadi informasi. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data *time series* atau runtut waktu. Setelah data terkumpul maka akan dilakukan analisis dengan menggunakan metode VECM (*Vector Error Correction Model*) dengan menggunakan perangkat komputer melalui program aplikasi Eviews versi 12.

Berdasarkan hal tersebut maka teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah:

1. Uji Stasioneritas Data

Uji stasioneritas adalah sebuah uji statistik yang digunakan untuk menentukan apakah suatu data runtun waktu (*time series*) bersifat stasioner atau tidak. Stasioner adalah proses keseimbangan yang akan menjadikan data konstan, artinya data tidak naik maupun turun atau fluktuasi data berada disekitar rata-rata.⁶

Menurut Brooks (dalam Putri), pengujian stasioneritas penting dilakukan untuk mengidentifikasi ketidakstasioneran karena beberapa alasan: (1) stasioneritas atau ketidakstasioneran deret dapat sangat memengaruhi perilaku dan sifatnya; (2) penggunaan data yang tidak stasioner dapat menyebabkan regresi palsu; dan (3) variabel yang tidak stasioner akan menghasilkan asumsi yang tidak valid. Suatu variabel dikatakan terintegrasi pada orde d $I(d)$ jika variabel tersebut menjadi stasioner setelah dilakukan diferensiasi sebanyak d kali. Jika suatu variabel mencapai stasioner setelah diferensiasi pertama, maka variabel tersebut

⁶ Ari Pani Desvina dan Purnama Sari Lubis, "Pendekatan VECM untuk Menganalisis Hubungan IHSG , BI Rate , Kurs (USD / IDR), dan Jumlah Uang Yang Beredar (M2)," *Jurnal Sains Matematika Dan Statistika* 5, no. 1 (2019): 109.

terintegrasi pada orde 1, atau $I(1)$. Ini berarti variabel tersebut non-stasioner pada level aslinya, tetapi menjadi stasioner setelah mengambil perbedaan pertamanya.⁷ Oleh karena itu, uji stasioner dilakukan pada tingkat level dan *differencing* dengan menggunakan uji akar unit nilai *Augmented Dickey-Fuller* (ADF). Jika nilai t-Statistic ADF lebih kecil dibanding nilai *test critical value* pada level $\alpha = 5\%$, maka data tidak stasioner.⁸

2. Pengujian Lag Optimal

Penentuan lag optimal merupakan tahapan yang sangat penting dalam pemodelan menggunakan VAR atau VECM. Lag Optimal adalah panjang lag yang dapat memberikan pengaruh atau respon yang signifikan dalam mendeteksi pengaruh dari setiap variabel terhadap variabel yang lain.⁹ Pengujian panjang lag optimal ini sangat berguna untuk menghilangkan masalah autokorelasi dalam sistem VAR yang digunakan sebagai analisis stabilitas VAR. Sehingga dengan digunakannya lag optimal diharapkan tidak muncul lagi masalah autokorelasi. Panjang lag optimal dapat dicari dengan menggunakan kriteria *Likelihood Ratio* (LR),

⁷ Putri Swastika dan Mansur Masih, "Do Interest Rate and Inflation Affect Unemployment? Evidence from Australia," *MPRA*, 2016, 8, <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/id/eprint/100067>.

⁸ Dita Fadma Ristianti dan Joko Purwadi, "Implementasi Metode VECM Dalam Menganalisis Pengaruh Kurs Mata Uang, Inflasi Dan Suku Bunga Terhadap Jakarta Islamic Indeks," *Jurnal Ilmiah Matematika* 6, no. 1 (2019): 14.

⁹ Aldi Anugerah Sitepu et al., "Pemodelan Produk Domestik Bruto (PDB) dengan Pendekatan Vector Error Correction Model (VECM)," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 2 (2023): 64.

*Final Prediction Error (FPE), Akaike Information Crition (AIC), Schwarz Information Crition (SC), dan Hannan-Quin Crition (HQ).*¹⁰

3. Uji Stabilitas VAR

Untuk mengetahui stabil atau tidaknya estimasi model VAR yaitu dengan mengetahui nilai modulus dari seluruh *roots of characteristic polynomial*. Jika modulus dari seluruh *roots of characteristic polynomial* kurang dari 1 maka sistem persamaan VAR dapat dikategorikan stabil. Uji VAR dilakukan dengan menghitung akar-akar dari fungsi polinomial atau dikenal dengan *roots of characteristic polinomial*. Jika semua akar dari fungsi polinomial berada di dalam unit circle maka model VAR tersebut dianggap stabil sehingga *Impuls Response Function (IRF)* dan *Variance Decomposition (VD)* yang dihasilkan dianggap valid.¹¹

4. Uji Kointegrasi

Kointegrasi menunjukkan adanya hubungan keseimbangan jangka panjang antar variabel-variabel yang tidak stasioner pada level (misalnya, semua stasioner pada first difference). Artinya, meskipun variabel-variabel tersebut bergerak secara terpisah dalam jangka pendek, mereka cenderung bergerak bersama menuju suatu keseimbangan jangka panjang.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam uji kointegrasi adalah metode johansen. Dalam pengujian kointegrasi ada atau tidaknya

¹⁰ Agus Tri Basuki dan Nano Prawoto, *Analisis Rergresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis (Dilengkapi Aplikasi SPSS & Eviews)* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2017), 8.

¹¹ Guruh Herman Was'an, "Pendekatan Analisis Vector Error Correction Model (VECM) Dalam Hubungan Kondisi Makro Ekonomi Dengan Non Performing Financing Berdasarkan Pengelompokan Modal Inti Bank Umum Syariah Di Indonesia," *Jurnal Neraca Peradaban* 2, no. 2 (2022): 132.

keseimbangan jangka panjang antar variabel dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai estimasi *trace statistic* dan *maximum eigen value* dengan nilai kritisnya (*critical value*) pada signifikansi 5%. Apabila nilai estimasi *trace statistic* dan *maximum eigen value* lebih besar daripada nilai kritisnya pada signifikansi 5%, maka menunjukkan bahwa terdapat hubungan kointegrasi antara variabel-variabel yang diuji. Namun, apabila nilai estimasi *trace statistic* dan *maximum eigen value* lebih kecil daripada nilai kritisnya maka menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan kointegrasi antara variabel-variabel yang diuji.¹²

5. Uji Kausalitas Granger

Uji kausalitas Granger (*Granger Causality Test*) dilakukan untuk melihat apakah dua variabel memiliki hubungan timbal balik atau tidak. Dengan kata lain, apakah satu variabel memiliki hubungan sebab akibat dengan variabel lainnya secara signifikan.¹³ Untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan kausalitas diantar variabel dalam model dapat menggunakan uji kausalitas granger dengan melihat nilai probabilitasnya. Antar variabel memiliki kausalitas jika nilai probabilitasnya kurang dari taraf nyata lima persen.¹⁴

¹² Rizka Yuliana, Skripsi: “*Model Transmisi Pengaruh Indeks Saham Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (Telaah Pada Jakarta Islamic Index)*” (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), 42.

¹³ Basuki dan Prawoto, *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis (Dilengkapi Aplikasi SPSS & Eviews)*, 11.

¹⁴ Guruh Herman Was'an, “Pendekatan Analisis Vector Error Correction Model (VECM) Dalam Hubungan Kondisi Makro Ekonomi Dengan Non Performing Financing Berdasarkan Pengelompokan Modal Inti Bank Umum Syariah Di Indonesia,” 132.

6. Uji VECM

Vector error correction model (VECM) merupakan bentuk VAR yang terestriksi karena keberadaan bentuk data yang tidak stasioner dan terkointegrasi yang menunjukkan adanya hubungan jangka panjang antar variabel di dalam sistem VAR. Model *Vector Error Correction model* (VECM) adalah suatu metode untuk menganalisis data runtun waktu pada model *Vector Autoregressive* (VAR) yang stasioner pada differensing pertama dan memenuhi uji kointegrasi.¹⁵ VECM menawarkan suatu prosedur kerja yang mudah untuk memisahkan komponen jangka panjang (*long-run*) dan komponen jangka pendek (*short-run*) dari proses pembentukan data. Dengan demikian, VECM berbeda dengan VAR dimana VECM dapat digunakan untuk memodelkan data *time series* yang terkointegrasi dan tidak stasioner.¹⁶

7. Impulse Response Function (IRF)

Analisis IRF adalah metode yang digunakan untuk menentukan respon suatu variabel endogen terhadap guncangan (*shock*) variabel tertentu. IRF juga digunakan untuk melihat guncangan dari satu variabel lain dan berapa lama pengaruh tersebut terjadi. Melalui IRF, respon sebuah perubahan independen sebesar satu standar deviasi dapat ditinjau. IRF menelusuri dampak gangguan sebesar satu standar kesalahan (*standard*

¹⁵ Ari Pani Desvina dan Purnama Sari Lubis, "Pendekatan VECM Untuk Menganalisis Hubungan IHSG, BI Rate, Kurs (USD / IDR), Dan Jumlah Uang Yang Beredar (M2)," 109.

¹⁶ Ineu Sulistiana, Hidayati, dan Sumar, "Model Vector Auto Regression (VAR) and Vector Error Correction Model (VECM) Approach for Inflation Relations Analysis, Gross Regional Domestic Product (GDP), World Tin Price, Bi Rate and Rupiah Exchange Rate," *Jurnal IJBE*, 2017, 20.

error) sebagai inovasi pada sesuatu variabel endogen terhadap variabel endogen yang lain.¹⁷

8. *Variance Decomposition (VD)*

Analisis *Variance decomposition* atau disebut juga *forecast error variance decomposition* digunakan untuk memprediksi kontribusi persentase varian setiap variabel karena adanya perubahan variabel tertentu di dalam sistem VAR.

Pada analisis IRF sebelumnya digunakan untuk melihat dampak guncangan dari satu perubahan terhadap perubahan lainnya, dalam analisis VD digunakan untuk menggambarkan relatif pentingnya setiap perubahan dalam sistem VAR karena adanya *shock*. *Variance Decomposition* digunakan dengan mengukur perkiraan *varians error* suatu variabel dengan menghitung seberapa besar kemampuan suatu variabel dalam memberikan penjelasan pada variabel lainnya atau pada variabel itu sendiri.¹⁸

¹⁷ Basuki dan Prawoto, *Analisis Rergresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis (Dilengkapi Aplikasi SPSS & Eviews)*, 4.

¹⁸ Jonathan Ersten Herawan et al., *Analisis Ekonomi Terapan Menggunakan Ms. Exel & E-Views 12* (Jakarta Selatan: Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, 2024), 78.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Kabupaten Lampung Timur adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Lampung, Indonesia. Secara geografis, kabupaten ini memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan laut di sebelah timur, yaitu Samudera Hindia, dan juga memiliki akses ke jalur darat yang menghubungkan antar kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Wilayahnya yang luas mencakup area daratan dan pesisir, memberikan karakteristik topografi dan potensi sumber daya alam yang beragam.

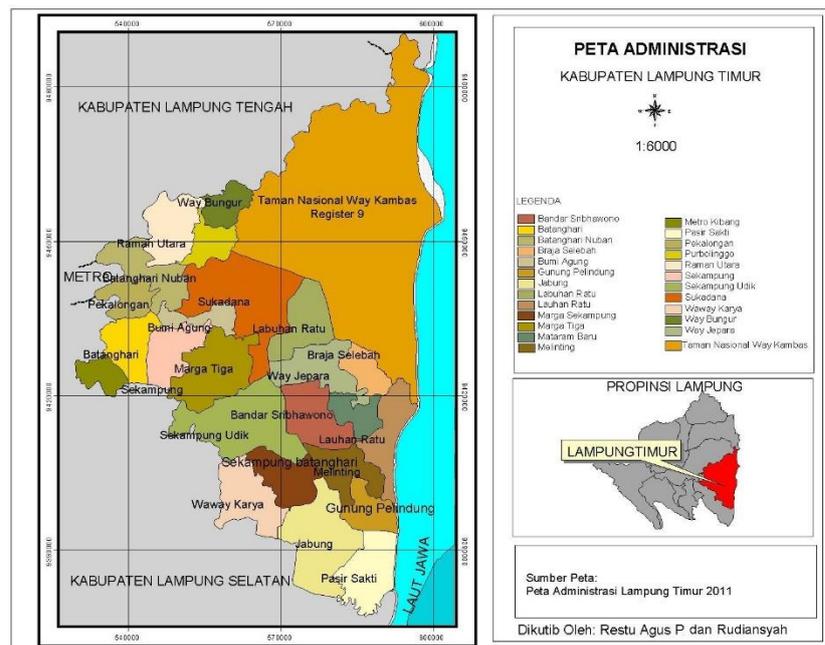
Lampung Timur merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 50 meter di atas permukaan laut dengan luas wilayah kurang lebih 5.325,03 km² atau sekitar 15% dari total luas wilayah Provinsi Lampung (total luas wilayah Provinsi Lampung 35.376 km²). Wilayah Kabupaten Lampung Timur sebelumnya merupakan wilayah Pembantu Bupati Lampung Tengah Wilayah Sukadana. Ibukota Kabupaten Lampung Timur berkedudukan di Sukadana.

Secara astronomis wilayah Kabupaten Lampung Timur terletak antara 105°15' BT - 106°20' BT dan 4°37' LS - 5°37' LS dan secara geografis batas wilayah Kabupaten Lampung Timur berbatasan langsung dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Rumbia, Kecamatan Seputih Surabaya dan Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah serta Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa, Provinsi Banten dan DKI Jakarta. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang, Kecamatan Ketibung, Kecamatan Palas, Kecamatan Tanjung Sari, Kecamatan Merbau Mataram, Kecamatan Way Sulan dan Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bantul dan Kecamatan Metro Raya, Kota Metro dan Kecamatan Punggur serta Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.¹

Gambar 4. 1 Peta Wilayah Administratif Kabupaten Lampung Timur



¹ Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, “Laporan Keuangan Tahunan Anggaran 2023”, Dalam <https://www.lampungtimurkab.go.id/show-pdf/25.-Informasi-CaLK-Pemerintah-Daerah-2023.pdf>. Diunduh pada 24 Juni 2025.

B. Hasil Analisis Data

1. Uji Stasioneritas Data

Pengujian stasioneritas data merupakan langkah awal yang krusial dalam pengolahan data deret waktu. Salah satu metode yang umum digunakan adalah uji akar unit (unit root test), yang dilakukan dengan menggunakan *Augmented Dickey-Fuller Test* (ADF Test). Uji ini berfungsi untuk menentukan apakah suatu variabel deret waktu bersifat stasioner atau tidak. Dalam analisis, kita biasanya mengharapkan hasil $I(1)$, yang artinya bahwa variabel tersebut menjadi stasioner setelah dilakukan diferensiasi pertama, sedangkan pada bentuk levelnya variabel tersebut tidak stasioner.

Berikut adalah hasil uji stasioneritas data pada variabel PAD, DAU dan Belanja Daerah pada tingkat level yang ditampilkan pada Tabel 4.1

Tabel 4. 1 Hasil Uji Akar Unit

	Variabel	t-statistic	Test critical values	Keterangan
<i>Level form</i>				
<i>Intercept and trend</i>	PAD	-1,4097	-4,1078 *	Tidak stasioner
	DAU	-2,4899	-3,9333 *	Tidak stasioner
	BD	-1,0299	-3,9333 *	Tidak stasioner
<i>First--differences</i>				
<i>Intercept but not a trend</i>	PAD	-6,3051	-3,2126 *	Stasioner
	DAU	-3,0093	-2,7476 **	Stasioner
	BD	-2,0244	-1,9823 *	Stasioner

Keterangan signifikan 5% (*); 10% (**)

Berdasarkan Tabel 4.1, setiap variabel menunjukkan hasil tidak stasioner pada tingkat level. Hal ini terlihat dari nilai t-statistik yang lebih

kecil dari nilai *critical values* pada α (5%). Oleh karena itu, data kemudian dilanjutkan ke tahap diferensiasi pertama (*first difference*).

Setelah dilakukan uji pada tingkat diferensiasi pertama, data berhasil menjadi stasioner. Ini ditunjukkan oleh nilai t-statistik yang kini lebih besar daripada *critical value*, yang mengindikasikan bahwa data sudah stasioner pada diferensiasi pertama.

2. Pengujian lag optimal

Penentuan lag yang optimum dilakukan untuk mengetahui panjang lag yang sesuai dalam membentuk model, sehingga dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel dengan baik. Dalam pemilihan panjang lag optimum pada penelitian ini didapatkan beberapa kriteria informasi, yaitu dari *Likelihood Ratio* (LR), *Final Prediction Error* (FPE), *Akaike Information Criterion* (AIC), *Schwarz Information Criterion* (SC), dan *Hannan-Quin Criterion* (HQ). Hasilnya tercantum dalam Tabel 4.2 di bawah ini:

Tabel 4. 2 Hasil Panjang Lag Optimal

<i>Lag</i>	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	NA	2,87e-09	-11,15754	-11,06677	-11,25712
1	19,94997*	7,18e-10*	-12,68254*	-12,31944*	-13,08086*

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa panjang lag optimal terletak pada lag 1, yang ditandai dengan banyaknya tanda bintang (*). Hal ini didukung oleh mayoritas kriteria, seperti AIC, SC, dan HQ, yang semua menunjukkan nilai terkecil (termasuk yang paling negatif) di lag 1, sehingga model yang akan digunakan berada pada lag 1.

3. Uji Stabilitas VAR

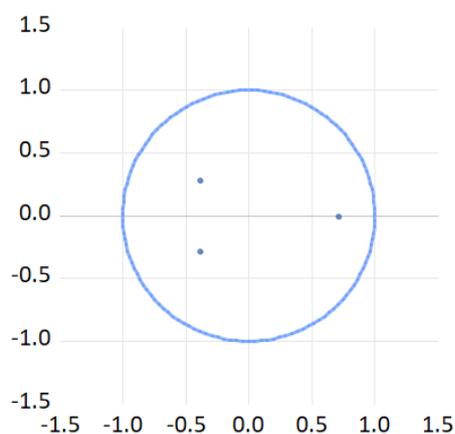
Setelah data stasioner pada *first difference*, langkah selanjutnya adalah uji stabilitas model VAR. Uji ini krusial karena jika hasil estimasi stabilitas VAR tidak stabil maka analisis IRF dan FEVD menjadi tidak valid. Sebuah model VAR dianggap stabil jika semua akar unitnya memiliki modulus < 1 . Berikut adalah hasil uji stabilitas VAR:

Tabel 4. 3 Hasil Stabilitas VAR

Root	Modulus
0,709662	0,709662
-0,387592 – 0,285412i	0,481339
-0,387592 – 0,285412i	0,481339

Gambar 4. 2 Grafik Hasil Stabilitas VAR

Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial



Berdasarkan Tabel 4.3, kolom nilai *root* menunjukkan akar karakteristik VAR yang terdiri dari bilangan *real* dan imajiner. Dapat diamati bahwa seluruh nilai modulus dari setiap *root* memiliki nilai kurang dari 1, yang berarti model VAR dengan lag 1 stabil dan dapat digunakan.

Selain itu, Gambar 4.1 memperkuat temuan ini, menunjukkan bahwa semua titik nilai akar berada di dalam *unit circle*. Oleh karena itu, model VAR ini dianggap stabil.

4. Uji Kointegrasi

Uji kointegrasi adalah analisis statistik yang bertujuan untuk memeriksa keberadaan hubungan jangka panjang antarvariabel. Pengujian ini merupakan langkah krusial dalam pemodelan *Vector error correction model* (VECM), karena keberhasilannya menentukan apakah variabel yang diteliti memiliki hubungan jangka panjang yang stabil.

Dalam analisis data penelitian ini, uji kointegrasi tidak dapat dilakukan. Temuan ini memiliki implikasi signifikan terhadap interpretasi hubungan antara variabel-variabel penelitian, khususnya antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan belanja daerah di Kabupaten Lampung Timur.

Ketidakmampuan untuk mengonfirmasi kointegrasi menunjukkan bahwa tidak ada hubungan keseimbangan jangka panjang yang stabil antara PAD, DAU, dan belanja daerah di wilayah tersebut. Karena tidak ditemukan adanya hubungan kointegrasi, uji *Vector Error Correction Model* (VECM) tidak dapat dilanjutkan.

Uji VECM mensyaratkan adanya kointegrasi antarvariabel untuk mengidentifikasi mekanisme koreksi terhadap penyimpangan jangka pendek menuju keseimbangan jangka panjang. Jika tidak ada kointegrasi, berarti tidak ada hubungan jangka panjang yang stabil antar variabel.

Dalam kasus ini, VECM tidak relevan dan tidak dapat digunakan. Model yang lebih tepat adalah VAR (*Vector Autoregression*) standar pada data yang sudah stasioner (data yang telah didiferensiasi). Interpretasi hasilnya akan fokus pada hubungan kausalitas jangka pendek.

Oleh karena itu, tahapan pengujian selanjutnya seperti uji kausalitas Granger pada data tidak stasioner (level) dan tidak terkointegrasi, akan dilakukan pada data yang sudah distasionerkan (*first difference*). Interpretasi hasilnya akan fokus pada hubungan kausalitas jangka pendek.

Sementara itu untuk analisis *Impulse Response Function* (IRF), dan analisis *Variance Decomposition* (VD) dapat tetap digunakan meskipun tidak ada kointegrasi. Kedua alat ini adalah bagian dari analisis VAR secara umum. Namun, interpretasi dari IRF dan VDC akan berbeda. Jika tidak ada kointegrasi, maka IRF dan VDC akan menunjukkan dinamika jangka pendek antar variabel.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan yaitu, jika tidak ada kointegrasi maka tidak bisa melanjutkan dengan model VECM. Alternatifnya adalah menggunakan model VAR pada data yang sudah stasioner (dengan melakukan *differencing*). Meskipun uji kausalitas Granger, IRF, dan VDC masih bisa dilakukan, interpretasinya harus disesuaikan ke arah keseimbangan jangka pendek, tidak dapat dilakukan dalam melihat hubungan jangka panjang.

5. Uji Kausalitas Granger

Pengujian kausalitas Granger bertujuan untuk mempelajari hubungan sebab-akibat antarvariabel. Uji ini menggunakan hipotesis untuk menentukan apakah satu variabel memiliki hubungan dua arah (timbang balik) atau satu arah terhadap variabel lain. Pada penelitian ini uji kausalitas granger akan dilakukan pada tingkat (*first difference*), yang interpretasi hasilnya akan fokus pada hubungan kausalitas jangka pendek. Hasil uji kausalitas Granger dapat dilihat pada Tabel 4.4

Tabel 4. 4 Hasil Uji Kausalitas Granger

D(X₁)	
Variabel	Probabilitas
D(X ₂)	0,0113
D(Y)	0,5022
All	0,0058
D(X₂)	
Variabel	Probabilitas
D(X ₁)	0,9652
D(Y)	0,5964
All	0,8394
D(Y)	
Variabel	Probabilitas
D(X ₁)	0,0226
D(X ₂)	0,4271
All	0,0741

Dari hasil yang diperoleh di atas, diketahui bahwa yang memiliki hubungan kausalitas adalah yang memiliki nilai probabilitas yang lebih kecil daripada alpha 0,05 sehingga nanti H₀ akan ditolak, yang berarti suatu variabel akan mempengaruhi variable lain. Dari pengujian Granger diatas, kita mengetahui hubungan timbal-balik (kausalitas) jangka pendek sebagai berikut:

- a. Ketika $D(X_1)$ (PAD) menjadi variabel terikat (yang dipengaruhi):
- $D(X_2)$ (DAU) terhadap $D(X_1)$ (PAD) nilai probabilitasnya adalah (0,0113) lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 yang berarti hipotesis nol ditolak. Ini menunjukkan bahwa DAU secara signifikan mempengaruhi PAD dalam jangka pendek.
 - $D(Y)$ (Belanja Daerah) terhadap $D(X_1)$ (PAD) nilai probabilitasnya adalah (0,5022) lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 yang berarti hipotesis nol diterima. Ini menunjukkan bahwa Belanja Daerah tidak secara signifikan mempengaruhi PAD dalam jangka pendek.
 - $D(X_2)$ dan $D(Y)$ secara bersamaan terhadap $D(X_1)$ nilai probabilitasnya adalah (0,0058) lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa DAU dan Belanja Daerah secara bersamaan signifikan mempengaruhi PAD dalam jangka pendek.
- b. Ketika $D(X_2)$ (DAU) menjadi variabel terikat (yang dipengaruhi):
- $D(X_1)$ (PAD) terhadap $D(X_2)$ (DAU) nilai probabilitasnya adalah (0,9652) lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 yang berarti hipotesis nol diterima. Ini menunjukkan bahwa PAD tidak secara signifikan mempengaruhi DAU dalam jangka pendek.
 - $D(Y)$ (Belanja Daerah) terhadap $D(X_2)$ (DAU) nilai probabilitasnya adalah (0,5964) lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 yang berarti hipotesis nol diterima. Ini

menunjukkan bahwa Belanja Daerah tidak secara signifikan mempengaruhi DAU dalam jangka pendek.

- $D(X_1)$ dan $D(Y)$ secara bersamaan terhadap $D(X_2)$ nilai probabilitasnya adalah (0,8394) lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa PAD dan Belanja Daerah secara bersamaan tidak secara signifikan mempengaruhi DAU dalam jangka pendek.

c. Ketika $D(Y)$ (Belanja Daerah) menjadi variabel terikat (yang dipengaruhi):

- $D(X_1)$ (PAD) terhadap $D(Y)$ (Belanja Daerah) nilai probabilitasnya adalah (0,0226) lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 yang berarti hipotesis nol ditolak. Ini menunjukkan bahwa PAD secara signifikan mempengaruhi Belanja Daerah dalam jangka pendek. Dengan kata lain, perubahan pada PAD cenderung menyebabkan perubahan pada Belanja Daerah.
- $D(X_2)$ (DAU) terhadap $D(Y)$ (Belanja Daerah) nilai probabilitasnya adalah (0,4271) lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa DAU tidak secara signifikan mempengaruhi Belanja Daerah dalam jangka pendek. Perubahan pada DAU tidak menyebabkan perubahan yang signifikan pada Belanja Daerah.

- $D(X_1)$ dan $D(X_2)$ secara bersamaan terhadap $D(Y)$ nilai probabilitasnya adalah (0,0741) lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa PAD dan DAU secara bersamaan tidak secara signifikan mempengaruhi Belanja Daerah dalam jangka pendek. Namun, perlu diingat bahwa secara terpisah PAD signifikan, jadi ini bisa mengindikasikan dominasi pengaruh PAD.

6. *Impulse Response Function (IRF)*

Analisis IRF digunakan untuk melihat bagaimana suatu variabel memengaruhi dirinya sendiri dan variabel lain di masa depan, setelah ada perubahan sebesar satu standar deviasi pada variabel tersebut. Hasil analisis IRF bisa Anda lihat di bawah ini:

Tabel 4. 5 Hasil *Impulse Response Function (IRF)* PAD

Response of $D(X_1)$			
Periode	$D(X_1)$	$D(X_2)$	$D(Y)$
1	0.053047	0.000000	0.000000
2	-0.006386	0.061406	-0.007803
3	-0.004622	-0.045840	0.007762
4	0.006991	0.022557	-0.002993
5	-0.002980	-0.005979	0.001385
6	0.001662	3.76E-05	0.000232
7	9.17E-05	0.001803	-6.64E-05
8	3.31E-05	-0.001089	0.000306
9	0.000300	0.000652	-2.98E-06
10	5.95E-06	-9.31E-05	8.67E-05

Berdasarkan tabel 4.5 di atas maka hasil dari adanya guncangan (*shock*) dari variabel PAD dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

a. $D(X_1)$ - Respons PAD terhadap Kejutan PAD:

Periode 1: Respons Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan angka 0,053047. Ini berarti, jika ada kejutan positif sebesar 1 unit pada PAD, maka PAD akan meningkat langsung sebesar 0,053047 unit pada periode yang sama. Angka ini mencerminkan dampak langsung dari kejutan tersebut pada variabel PAD itu sendiri.

Periode 2 dan 3: Respons PAD terhadap dirinya sendiri menurun, mencapai angka -0,006386 dan -0,004622. Ini mengindikasikan bahwa efek kejutan positif awal pada PAD mulai mereda.

Periode selanjutnya (4-10): Respons PAD cenderung berfluktuasi dan semakin mengecil seiring waktu. Hal ini menunjukkan bahwa dampak guncangan awal pada PAD akan mereda secara bertahap, dan PAD cenderung kembali ke kondisi stabil atau semula.

b. $D(X_2)$ - Respons PAD terhadap Kejutan DAU:

Periode 1: Jika ada guncangan positif pada DAU (misalnya, peningkatan tak terduga dalam transfer DAU dari pemerintah pusat), respons PAD pada periode ini adalah 0,000000. Ini menunjukkan bahwa pada periode pertama, guncangan DAU belum memengaruhi PAD secara langsung.

Periode 2: PAD merespons positif terhadap guncangan DAU dengan kenaikan 0,061406. Ini menunjukkan bahwa peningkatan DAU dapat mendorong peningkatan PAD di periode berikutnya.

Periode 3: PAD menurun lagi menjadi -0.004622.

Periode 4 dan seterusnya: Respon PAD berfluktuasi, namun cenderung mendekati nol. Ini mengindikasikan bahwa guncangan pada DAU memiliki efek yang bersifat sementara terhadap PAD.

c. D(Y) - Respons PAD terhadap Kejutan Belanja Daerah:

Periode 1: Jika ada guncangan positif pada Belanja Daerah (misalnya, peningkatan tak terduga dalam pengeluaran daerah), respons PAD pada periode ini adalah 0.000000. Artinya guncangan pada belanja daerah belum memengaruhi PAD.

Periode 2: Respons PAD terhadap guncangan pada Belanja Daerah menunjukkan angka -0,007803. Ini berarti pada periode kedua, meskipun terjadi peningkatan/guncangan pada Belanja Daerah, dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru negatif atau belum langsung terlihat positif. Dengan kata lain, kenaikan Belanja Daerah pada periode ini belum serta-merta meningkatkan PAD.

Periode 3: Angka 0,007762. Pada periode ketiga, PAD mulai menunjukkan respons positif, hampir mengimbangi penurunan di periode sebelumnya. Ini menunjukkan adanya penyesuaian untuk meningkatkan PAD setelah kejutan belanja.

Periode 4 dan seterusnya: Respon PAD berfluktuasi, namun dengan magnitudo yang sangat kecil dan cenderung mendekati nol. Ini menunjukkan bahwa efek guncangan Belanja Daerah terhadap PAD juga bersifat sementara.

Tabel 4. 6 Hasil *Impulse Response Function* (IRF) DAU

Response of D(X2):			
Periode	D(X ₁)	D(X ₂)	D(Y)
1	0.014556	0.028841	0.000000
2	0.000275	-0.002710	0.003750
3	0.004442	0.000620	0.002155
4	0.002190	0.003838	0.001053
5	0.001316	-0.000500	0.001234
6	0.001341	0.001357	0.000609
7	0.000691	0.000383	0.000526
8	0.000598	0.000325	0.000362
9	0.000401	0.000324	0.000244
10	0.000278	0.000145	0.000186

Berdasarkan tabel 4.6 di atas maka hasil dari adanya guncangan (*shock*) dari variabel DAU dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

a. D(X₁) - Respons DAU terhadap Kejutan PAD:

Periode 1: Ketika ada kejutan positif pada PAD, maka DAU langsung mengalami peningkatan sebesar 0,014556. Ini menunjukkan ada dampak positif awal dari PAD terhadap DAU.

Periode 2: Respons DAU terhadap guncangan PAD mengalami penurunan menjadi 0,000275, menunjukkan bahwa dampak positif awal mulai berkurang.

Periode 3: Respons DAU terhadap guncangan PAD meningkat lagi menjadi 0,004442.

Periode 4 dan seterusnya: Terjadi fluktuasi, namun secara umum respons DAU terhadap kejutan PAD cenderung menurun dan mendekati nol pada periode-periode selanjutnya (menunjukkan bahwa dampak kejutan PAD terhadap DAU bersifat sementara).

b. D(X2) - Respons DAU terhadap Kejutan DAU (Ini adalah kejutan untuk sendiri):

Periode 1: DAU menunjukkan respons terbesar yaitu 0,028841. Ini wajar karena ini adalah kejutan yang diberikan pada DAU itu sendiri.

Periode 2: Respons DAU menjadi -0.002710, artinya ada sedikit penurunan setelah guncangan awal. Ini bisa jadi penyesuaian atau efek balik.

Periode 3 dan seterusnya: Respons DAU terhadap kejutan DAU cenderung menurun dengan cepat dan mendekati nol pada periode-periode selanjutnya (0,000620; 0,003838; dst.). Ini menunjukkan bahwa dampak kejutan DAU pada DAU itu sendiri juga bersifat sementara dan tidak berkelanjutan.

c. D(Y) - Respons DAU terhadap Kejutan Belanja Daerah:

Pada periode 1: DAU tidak menunjukkan respons langsung (0,000000) saat terjadi guncangan pada belanja daerah. Ini bisa berarti

ada jeda waktu bagi DAU untuk bereaksi terhadap perubahan Belanja Daerah.

Periode 2: DAU mulai bereaksi dengan peningkatan sebesar 0,003750. Ini mengindikasikan bahwa setelah satu periode, kejutan Belanja Daerah mulai memengaruhi DAU.

Periode 3 dan seterusnya: Respons DAU cenderung fluktuatif dan menurun secara bertahap, mendekati nol pada periode-periode selanjutnya (0,002155; 0,001053; 0,001234 dst.). Ini menunjukkan bahwa dampak kejutan Belanja Daerah terhadap DAU juga bersifat sementara, namun membutuhkan waktu untuk terlihat dan kemudian mereda.

Tabel 4. 7 Hasil *Impulse Response Function* (IRF) Belanja Daerah

Response of D(Y):			
Periode	D(X₁)	D(X₂)	D(Y)
1	0.010794	0.010731	0.010575
2	0.012611	0.000883	0.008356
3	0.008940	0.010574	0.004451
4	0.005205	0.001353	0.004108
5	0.004579	0.003424	0.002522
6	0.002827	0.001945	0.001875
7	0.002129	0.001185	0.001356
8	0.001514	0.001105	0.000923
9	0.001044	0.000625	0.000679
10	0.000764	0.000506	0.000472

Berdasarkan tabel 4.7 di atas maka hasil dari adanya guncangan (*shock*) dari variabel Belanja Daerah dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

a. $D(X_1)$ - Respons Belanja daerah terhadap Kejutan PAD:

Periode 1: Respon Belanja Daerah terhadap guncangan PAD adalah 0,010794. Ini berarti pada periode awal setelah PAD mengalami guncangan positif, Belanja Daerah juga akan meningkat sebesar 0.010794.

Periode 2: Respon belanja daerah terhadap PAD meningkat menjadi 0,012611. Ini menunjukkan bahwa dampak positif guncangan PAD terhadap Belanja Daerah masih berlanjut dan bahkan sedikit menguat pada periode kedua.

Periode selanjutnya (3, 4, dst.): Responsnya cenderung menurun (0,008940; 0,005205, dst.). Ini berarti efek positif dari guncangan PAD terhadap Belanja Daerah semakin melemah seiring berjalannya waktu.

Kesimpulan Jangka Pendek untuk PAD: Pada jangka pendek, peningkatan PAD (guncangan positif) memiliki dampak positif yang signifikan terhadap Belanja Daerah. Dampak ini paling kuat pada periode 1 dan 2, kemudian berangsur-angsur melemah. Ini masuk akal, karena semakin banyak pendapatan daerah, pemerintah cenderung memiliki lebih banyak anggaran untuk belanja.

b. $D(X_2)$ - Respons Belanja daerah terhadap Kejutan DAU:

Periode 1: Respon Belanja Daerah terhadap guncangan DAU adalah 0,010731. Ini berarti pada periode awal setelah DAU

mengalami guncangan positif, Belanja Daerah akan meningkat sebesar 0,010731.

Periode 2: Responnya menurun drastis menjadi 0,000883. Ini menunjukkan bahwa dampak positif guncangan DAU terhadap Belanja Daerah melemah dengan cepat setelah periode pertama.

Periode selanjutnya (3, 4, dst.): Responnya cenderung meningkat sedikit pada periode 3 dan 4, kemudian menurun lagi (0.010574, 0.001353, dst.).

Kesimpulan Jangka Pendek untuk DAU: Pada jangka pendek, guncangan positif pada DAU memang meningkatkan Belanja Daerah, terutama pada periode pertama. Namun, dampaknya tidak sekuat dan tidak bertahan selama dampak dari PAD.

c. $D(Y)$ – Respons Belanja daerah terhadap Kejutan Belanja daerah (Ini adalah kejutan untuk sendiri):

Pada periode 1: Responnya adalah 0,010575. Ini berarti jika ada guncangan positif pada Belanja Daerah itu sendiri, maka pada periode awal Belanja Daerah akan meningkat sebesar 0,010575. Ini adalah efek paling langsung dan langsung terlihat.

Periode 2: Responnya menurun drastis menjadi 0.008356. Ini menunjukkan bahwa dampak dari guncangan pada Belanja Daerah itu sendiri mulai berkurang pada periode kedua.

Periode selanjutnya (3, 4, dst.): Responsnya terus menurun secara signifikan dan cenderung mendekati nol (0,004451; 0,004108; dan seterusnya)

7. *Variance Decomposition* (VD)

Variance decomposition bertujuan untuk mengukur besarnya kontribusi atau komposisi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependennya. Berikut adalah hasil VD yang disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4. 8 Hasil Variance Decomposition

Variance Decomposition of D(Y)			
Periode	D(X₁)	D(X₂)	D(Y)
1	33.92272	33.52206	32.55522
2	48.07973	20.22648	31.69379
3	45.30308	29.02278	25.67413
4	46.06696	27.64272	26.29032
5	46.40959	27.74930	25.84111
6	46.51096	27.69731	25.79173
7	46.61354	27.61345	25.77301
8	46.64226	27.61517	25.74258
9	46.66268	27.59897	25.73835
10	46.67242	27.59482	25.73276

Berdasarkan tabel 4.8 diperoleh hasil analisis *Variance Decomposition* yang menunjukkan bahwa kontribusi PAD (X₁) cenderung meningkat secara bertahap dari periode ke periode, hingga mencapai sekitar 46,67% pada periode 10. Ini menunjukkan bahwa seiring berjalannya waktu dalam jangka pendek, perubahan PAD semakin

memiliki peran yang lebih besar dalam menjelaskan perubahan belanja daerah.

Kontribusi DAU (X_2) terlihat lebih fluktuatif di awal, kemudian cenderung mendekati angka 27,59% di periode-periode selanjutnya. Ini menunjukkan bahwa DAU memiliki pengaruh yang konsisten namun tidak sedominan PAD dalam menjelaskan variasi belanja daerah pada periode-periode ini. Kemudian untuk kontribusi Belanja Daerah (Y) itu sendiri (endogen) cenderung menurun secara bertahap dari periode ke periode. Ini dikarenakan semakin banyak periode berlalu, pengaruh variabel eksogen (PAD dan DAU) semakin terlihat dibandingkan pengaruh dari variabel itu sendiri di masa lalu.

C. Pembahasan

1. Pengaruh dalam jangka panjang PAD terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Lampung Timur tahun 2012-2023

Berdasarkan hasil analisis statistik, tidak ditemukan hubungan kointegrasi (hubungan jangka panjang) antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Daerah di Kabupaten Lampung Timur tahun 2012 hingga 2023. Ini berarti pergerakan kedua variabel tersebut dalam jangka panjang bersifat independen satu sama lain dan tidak cenderung bergerak bersama menuju keseimbangan jangka panjang.

Pada uji kausalitas Granger yang dilakukan pada tingkat *first differences* menunjukkan hasil signifikan untuk hubungan jangka pendek. Dengan nilai probabilitas PAD terhadap Belanja Daerah sebesar 0,0226

(<0,05), dapat disimpulkan bahwa PAD secara signifikan memengaruhi Belanja Daerah dalam jangka pendek. Artinya, perubahan pada PAD cenderung menyebabkan perubahan pada Belanja Daerah dalam periode waktu yang relatif singkat.

Temuan ini konsisten dengan Teori Wagner yang dikemukakan pada abad ke-19. Teori Wagner menyatakan bahwa seiring peningkatan pendapatan per kapita dalam suatu perekonomian, pengeluaran pemerintah juga akan meningkat. Dalam konteks penelitian ini, peningkatan PAD (sebagai salah satu bentuk pendapatan daerah) berpotensi mendorong peningkatan Belanja Daerah.

2. Pengaruh dalam jangka panjang DAU terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Lampung Timur tahun 2012-2023

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. DAU digunakan untuk mendukung pelayanan dasar kepada masyarakat, seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya. Selain itu, dana ini juga fleksibel untuk membiayai berbagai jenis belanja daerah, termasuk belanja pegawai (seperti gaji dan tunjangan ASN di daerah, termasuk guru dan tenaga kesehatan) dan belanja operasional lainnya.

Hasil uji kointegrasi menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan jangka panjang (kointegrasi) antara Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Daerah di Kabupaten Lampung Timur tahun 2012 hingga 2023.

Ini berarti bahwa, dalam jangka panjang pergerakan kedua variabel tersebut bersifat independen satu sama lain dan tidak cenderung bergerak bersama menuju keseimbangan jangka panjang.

Selanjutnya, uji kausalitas Granger pada tingkat *first differences* menunjukkan bahwa DAU tidak secara signifikan memengaruhi Belanja Daerah dalam jangka pendek. Ini terlihat dari nilai probabilitas DAU terhadap Belanja Daerah sebesar 0,4271, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Artinya, meskipun DAU berkontribusi pada peningkatan kapasitas fiskal daerah, dampaknya terhadap Belanja Daerah dalam jangka pendek tidak selalu langsung terlihat. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor yang memengaruhi alokasi dan penggunaan dana, seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan lain (misalnya DAK dan DBH), serta prioritas pembangunan yang sudah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Lampung Timur.

3. Fenomena *Flypaper Effect* Pada Belanja Daerah di Kabupaten Lampung Timur tahun 2012-2023

Flypaper effect merupakan suatu keadaan dimana respon (belanja) dari pemerintah daerah lebih banyak menggunakan dana transfer pusat (DAU) dibandingkan dengan menggunakan kemampuan pendapatan sendiri yaitu PAD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki hubungan kausalitas jangka pendek terhadap belanja daerah, sedangkan dana alokasi umum dinyatakan tidak hubungan kausalitas jangka pendek terhadap belanja daerah.

Analisis *Variance Decomposition* (VD) memberikan gambaran tentang besarnya kontribusi masing-masing variabel independen terhadap Belanja Daerah sebagai variabel dependen. Hasilnya menunjukkan bahwa pada periode ke-10, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah mencapai sekitar 46,67%. Sementara itu, Dana Alokasi Umum (DAU) berkontribusi sekitar 27,59% pada periode yang sama. Angka-angka ini menunjukkan bahwa seiring waktu, terutama dalam jangka pendek, perubahan PAD memiliki peran yang semakin besar dalam menjelaskan fluktuasi Belanja Daerah

Dengan demikian, hipotesis H_{a3} yang menyatakan terjadinya fenomena *Flypaper Effect* pada belanja daerah di Kabupaten Lampung Timur tahun 2012-2023 ditolak. *Flypaper Effect* merujuk pada kondisi di mana dana transfer dari pemerintah pusat (DAU) memiliki pengaruh yang lebih besar pada pengeluaran daerah dibandingkan dengan peningkatan pendapatan daerah yang berasal dari PAD. Berdasarkan hasil VD ini, justru sebaliknya yang terjadi, bahwa kontribusi PAD jauh lebih besar dibandingkan DAU dalam menjelaskan variasi Belanja Daerah. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Lampung Timur lebih responsif terhadap perubahan pendapatan yang mereka hasilkan sendiri daripada dana transfer dari pusat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Lampung Timur selama periode 2012-2023, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan memengaruhi Belanja Daerah dalam jangka pendek, artinya perubahan PAD cenderung menyebabkan perubahan pada Belanja Daerah.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) tidak secara signifikan memengaruhi Belanja Daerah dalam jangka pendek, sehingga perubahan pada DAU tidak menyebabkan perubahan yang signifikan pada Belanja Daerah.
3. PAD lebih dominan dalam memengaruhi Belanja Daerah dibandingkan DAU. Sehingga tidak terjadi *flypaper effect* pada pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur selama periode 2012-2023. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Raudhotul Azizah yang berjudul “*Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2005-2020 Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, yang menunjukkan tidak terjadi *flypaper effect* pada pemerintah daerah di Provinsi Lampung.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang dikemukakan, maka ada beberapa saran yang dapat diberikan, antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur diharapkan dapat menggali dan mengoptimalkan potensi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD ini akan menjadi sumber dana utama bagi Belanja Daerah, sehingga penggunaannya dapat lebih optimal dan efisien.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang berfokus pada topik Belanja Daerah. Disarankan agar peneliti berikutnya dapat memanfaatkan data yang lebih baru, memperpanjang rentang waktu penelitian, serta mempertimbangkan penggunaan indikator yang sama atau indikator alternatif untuk memperkaya dan mengembangkan studi lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Fitri. "Analisis Flypaper Effect Pada Belanja Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Banten." *Jurnal Organisasi Dan Manajemen* 11, no. 1 (2015).
- Ambaya. *Ekonomi Keuangan Daerah*. Bandar Lampung: AURA CV.Anugrah Utama Raharja, 2023.
- Andriana, Nina. "Pengaruh Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Daerah." *Jurnal Pajak Dan Keuangan* 2, no. 1 (2020).
- Armawaddin, Muhamad, Wali Aya Rumbia, dan Muhammad Nur Afiat. "Analisis Flypaper Effect Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Sulawesi." *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia* 18, no. 1 (2017).
- Basuki, Agus Tri, dan Nano Prawoto. *Analisis Rergresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis (Dilengkapi Aplikasi SPSS & Eviews)*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2017.
- Bratakusumah, Deddy Supriady, dan Dadang Solihin. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Christia, Adissya Mega, dan Budi Ispriyarso. "Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia." *Jurnal Law Reform* 15, no. 1 (2019).
- Desvina, Ari Pani, dan Purnama Sari Lubis. "Pendekatan VECM Untuk Menganalisis Hubungan IHSG , BI Rate , Kurs (USD / IDR), Dan Jumlah Uang Yang Beredar (M2)." *Jurnal Sains Matematika Dan Statistika* 5, no. 1 (2019).
- Dilliana, Siktania Maria, dan Henrikus Herdi. *Manajemen Keuangan Daerah*. Eureka Media Aksara, 2022.
- Ekawarna, Shita Unjaswati. "Analisis Flypaper Effect Pada Belanja Daerah (Studi Komparasi Daerah Induk Dan Pemekaran Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi)." *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah* 4, no. 3 (2017).
- Elsye, Rosemery. *Desentralisasi Fiskal*. Bandung: Alqaprint Jatinangor, 2013.
- Elsye, Rosmey. *Alokasi Keuangan Daerah Berdasarkan Potensi Daerah*. Sumedang: Alqaprint Jatinangor, 2020.
- Firdaus, Muhamad Rafi, Husen Saeful Anwar, dan Ibnu Malik. "Efektivitas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2017-2019 Di Kota Bandung." *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 12 (2022).

- Hastuti, Proborini. "Desentralisasi Fiskal Dan Stabilitas Politik Dalam Kerangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia." *Jurnal Simposium Nasional Keuangan Negara*, 2018.
- Herawan, Jonathan Ersten, Laurensius Farel Dwi Putranto, Mawar Diah Estiana, Fabritio Paulus Kumowal, Mario Rosario Wisnu Aji, Y. Sri Susilo, Yohanes B. Kadarusman, dan Firman Sihol Parningotan. *Analisis Ekonomi Terapan Menggunakan Ms. Exel & E-Views 12*. Jakarta Selatan: Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, 2024.
- Herlina, Elita. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Daerah Serta Dampaknya Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Berau." *Jurnal Ekonomika Bisnis* 4, no. 1 (2013).
- Hidayanti. "Efektivitas Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Retribusi Izin Trayek Di Kabupaten Lampung Timur." Universitas Padjadjaran Bandung, 2017.
- Inayati, Nur Isna, dan Doddy Setiawan. "Fenomena Flypaper Effect Pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* 1, no. 2 (2012).
- Jannah, Hilyatul. "Pengaruh Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah." *Jurnal Ilmu Riset Dan Akuntansi* 9, no. 12 (2020).
- Kamaroellah, Agoes. *Pajak Dan Retribusi Daerah*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2019.
- Kresnandra, Anak Agung Ngurah Agung. "Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Dana Perimbangan Dan Investasi Swasta Sebagai Variabel Pemoderasi." *Jurnal Bisnis Dan Manajemen* 3, no. 2 (2016).
- Liando, Ivoni Ike, dan Suwardi Bambang Hermanto. "Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Daerah Pada Kabupaten / Kota Jawa Timur." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 6, no. 6 (2017).
- Melda, Helmi, dan Efrizal Syofyan. "Analisis Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat." *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 2, no. 2 (2020).
- Mulya, Rahmatul, dan Bustamam. "Pengaruh Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Banda Aceh (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2008-2014)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* 1, no. 2 (2016).

- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah., Pub. L. No. 13 (n.d.).
- Priadana, Sidik, dan Denok Sunarsi. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Tangerang: Pascal Books, 2021.
- Purba, Rahima Br. *Teori Akuntansi: Sebuah Pemahaman Untuk Mendukung Penelitian Di Bidang Akuntansi*. Medan: Merdeka Kreasi, 2023.
- Puspita, Dewi, Merita Pahlevi, Yoga Madya Raharja, Sukma Hadi, dan Azhariantolatif Baroto. *Dua Dekade Implementasi Desentralisasi Fiskal Di Indonesia*. Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal, 2021.
- Risianti, Dita Fadma, dan Joko Purwadi. "Implementasi Metode VECM Dalam Menganalisis Pengaruh Kurs Mata Uang , Inflasi Dan Suku Bunga Terhadap Jakarta Islamic Indeks." *Jurnal Ilmiah Matematika* 6, no. 1 (2019).
- Sahir, Syafrida Hanfni. *Metodologi Penelitian*. Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2022.
- Setyawan, Heru. "PAD Lampung Timur Didominasi Pajak Penerangan Jalan." ANTARA, n.d. <https://lampung.antarane.ws.com/berita/275780/pad-lamtim-didominasi-pajak-penerangan-jalan>.
- Sitepu, Aldi Anugerah, Bertho Tantular, Gungum Darmawan, Resa Septiani, Pontoh, dan Defii Yusti Faidah. "Pemodelan Produk Domestik Bruto (PDB) Dengan Pendekatan Vector Error Correction Model (VECM)." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 2 (2023).
- Sulaiman, Muz'an. "Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Flypaper Effect Pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat." *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan* 6 (2023).
- Sulistiana, Ineu, Hidayati, dan Sumar. "Model Vector Auto Regression (VAR) and Vector Error Correction Model (VECM) Approach for Inflation Relations Analysis , Gross Regional Domestic Product (GDP), World Tin Price , Bi Rate and Rupiah Exchange Rate." *Jurnal IJBE*, 2017.
- Swastika, Putri, dan Mansur Masih. "Do Interest Rate and Inflation Affect Unemployment? Evidence from Australia." *MPRA*, 2016.
- Syahidin, dan Abd Jail. "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Aceh Tengah." *Jurnal GPJER* 2, no. 1 (2020).
- Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pub. L. No. 33 (2004).
- Utami, Sagita, dan Deden dinar iskandar. "Flypaper Effect Terhadap Determinan Belanja Daerah Dan Determinan Pendapatan Asli Daerah Pada 34 Provinsi Di Indonesia Tahun 2013-2018 (Two Stage Least Square)." *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* 3, no. 3 (2020).

- Was'an, Guruh Herman. "Pendekatan Analisis Vector Error Correction Model (VECM) Dalam Hubungan Kondisi Mktro Ekonomi Dengan Non Performing Financing Berdasarkan Pengelompokan Modal Inti Bank Umum Syariah Di Indonesia." *Jurnal Neraca Peradaban* 2, no. 2 (2022).
- Yuliana, Rizka. "Model Transmisi Pengaruh Indeks Saham Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (Telaah Pada Jakarta Islamic Index)." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Zelmiyanti, Riri. "Pendekatan Teori Keagenan Pada Kinerja Keuangan Daerah Dan Belanja Modal (Studi Pada Provinsi Di Indonesia)." *JRAK* 7, no. 1 (2016).

LAMPIRAN

Lampiran 1: Data Realisasi PAD, DAU, dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2012-2023

Tahun	PAD	DAU	Belanja Daerah
	XI	X2	Y
2012	49.362.536.451	763.748.797.000	1.248.733.644.646
2013	40.476.211.275	860.136.385.000	1.410.275.163.144
2014	83.131.971.570	940.041.243.000	1.512.492.030.233
2015	84.496.936.514	974.792.193.000	1.733.408.499.652
2016	94.924.247.670	1.081.165.467.000	1.922.657.369.456
2017	111.886.192.444	1.062.555.526.000	1.947.368.023.838
2018	125.035.523.317	1.069.168.109.000	2.002.789.116.452
2019	147.527.535.828	1.106.577.701.000	2.086.664.488.096
2020	157.810.377.070	1.007.072.973.000	2.129.425.889.847
2021	158.378.912.073	1.029.485.339.000	2.194.372.035.257
2022	195.574.745.737	987.195.089.258	2.064.320.644.252
2023	196.136.238.928	1.077.274.703.452	2.096.191.300.838

➤ Hasil log data

LX1	LX2	LY
10,6934	11,88295054	12,09646981
10,6072	11,93456732	12,14930386
10,91977	11,97314691	12,17969309
10,92684	11,98891204	12,23890092
10,97738	12,03389217	12,2839019
11,04878	12,02635163	12,28944803
11,09703	12,029046	12,30163522
11,16887	12,04398191	12,31945263
11,19814	12,00306094	12,32826253
11,1997	12,01262017	12,34131026
11,29131	11,99440299	12,31477716
11,29256	12,03232646	12,32143091

Lampiran 2: Hasil Olah Data E-Viwes

UJI STASIONER

a. Level Form (ADF)

X1

Null Hypothesis: X1 has a unit root
 Exogenous: Constant, Linear Trend
 Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=2)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-1.409728	0.7832
Test critical values:		
1% level	-5.521860	
5% level	-4.107833	
10% level	-3.515047	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
 and may not be accurate for a sample size of 9

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
 Dependent Variable: D(X1)
 Method: Least Squares
 Date: 06/20/25 Time: 12:15
 Sample (adjusted): 2015 2023
 Included observations: 9 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1(-1)	-0.758114	0.537773	-1.409728	0.2314
D(X1(-1))	-0.325967	0.204931	-1.590618	0.1869
D(X1(-2))	-0.191163	0.138305	-1.382187	0.2391
C	8.283398	5.762386	1.437495	0.2239
@TREND("2012")	0.028934	0.027970	1.034454	0.3594
R-squared	0.722216	Mean dependent var		0.041421
Adjusted R-squared	0.444433	S.D. dependent var		0.033548
S.E. of regression	0.025006	Akaike info criterion		-4.239261
Sum squared resid	0.002501	Schwarz criterion		-4.129692
Log likelihood	24.07667	Hannan-Quinn criter.		-4.475711
F-statistic	2.599925	Durbin-Watson stat		2.431289
Prob(F-statistic)	0.188621			

X2

Null Hypothesis: X2 has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=2)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-2.489982	0.3258
Test critical values:		
1% level	-5.124875	
5% level	-3.933364	
10% level	-3.420030	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
and may not be accurate for a sample size of 11

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(X2)
Method: Least Squares
Date: 06/20/25 Time: 12:17
Sample (adjusted): 2013 2023
Included observations: 11 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X2(-1)	-0.462192	0.185621	-2.489982	0.0375
C	5.555095	2.215410	2.507479	0.0365
@TREND("2012")	0.000258	0.002690	0.096003	0.9259
R-squared	0.570546	Mean dependent var		0.013580
Adjusted R-squared	0.463183	S.D. dependent var		0.028669
S.E. of regression	0.021005	Akaike info criterion		-4.661097
Sum squared resid	0.003530	Schwarz criterion		-4.552580
Log likelihood	28.63603	Hannan-Quinn criter.		-4.729502
F-statistic	5.314156	Durbin-Watson stat		2.523002
Prob(F-statistic)	0.034015			

Y

Null Hypothesis: Y has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=2)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-1.029959	0.8926
Test critical values:		
1% level	-5.124875	
5% level	-3.933364	
10% level	-3.420030	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
and may not be accurate for a sample size of 11

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(Y)
Method: Least Squares
Date: 06/20/25 Time: 12:19
Sample (adjusted): 2013 2023
Included observations: 11 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Y(-1)	-0.155235	0.150720	-1.029959	0.3332
C	1.938212	1.827201	1.060754	0.3198
@TREND("2012")	-0.002469	0.003715	-0.664467	0.5251
R-squared	0.681870	Mean dependent var		0.020451
Adjusted R-squared	0.602337	S.D. dependent var		0.024775
S.E. of regression	0.015623	Akaike info criterion		-5.253146
Sum squared resid	0.001953	Schwarz criterion		-5.144630
Log likelihood	31.89231	Hannan-Quinn criter.		-5.321551
F-statistic	8.573457	Durbin-Watson stat		2.481683
Prob(F-statistic)	0.010243			

b. First Differences

X1

Null Hypothesis: D(X1) has a unit root
 Exogenous: Constant
 Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=2)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-6.305118	0.0007
Test critical values:		
1% level	-4.297073	
5% level	-3.212696	
10% level	-2.747676	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations and may not be accurate for a sample size of 10

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
 Dependent Variable: D(X1,2)
 Method: Least Squares
 Date: 06/20/25 Time: 12:23
 Sample (adjusted): 2014 2023
 Included observations: 10 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(X1(-1))	-1.558796	0.247227	-6.305118	0.0002
C	0.101947	0.028142	3.622615	0.0068
R-squared	0.832477	Mean dependent var		0.008744
Adjusted R-squared	0.811536	S.D. dependent var		0.174435
S.E. of regression	0.075727	Akaike info criterion		-2.146516
Sum squared resid	0.045876	Schwarz criterion		-2.085999
Log likelihood	12.73258	Hannan-Quinn criter.		-2.212903
F-statistic	39.75451	Durbin-Watson stat		0.784509
Prob(F-statistic)	0.000232			

X2

Null Hypothesis: D(X2) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=2)

	t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic	-3.009326	0.0678
Test critical values:		
1% level	-4.297073	
5% level	-3.212696	
10% level	-2.747676	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
and may not be accurate for a sample size of 10

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(X2,2)
Method: Least Squares
Date: 06/20/25 Time: 12:24
Sample (adjusted): 2014 2023
Included observations: 10 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(X2(-1))	-0.995703	0.330872	-3.009326	0.0168
C	0.009728	0.009820	0.990583	0.3509
R-squared	0.530958	Mean dependent var		-0.001369
Adjusted R-squared	0.472328	S.D. dependent var		0.039623
S.E. of regression	0.028783	Akaike info criterion		-4.081240
Sum squared resid	0.006627	Schwarz criterion		-4.020723
Log likelihood	22.40620	Hannan-Quinn criter.		-4.147627
F-statistic	9.056043	Durbin-Watson stat		2.120607
Prob(F-statistic)	0.016831			

Y

Null Hypothesis: D(Y) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=2)

	t-Statistic
Elliott-Rothenberg-Stock DF-GLS test statistic	-2.024467
Test critical values: 1% level	-2.816740
5% level	-1.982344
10% level	-1.601144

*MacKinnon (1996)
Warning: Test critical values calculated for 20 observations
and may not be accurate for a sample size of 10

DF-GLS Test Equation on GLS Detrended Residuals
Dependent Variable: D(GLSRESID)
Method: Least Squares
Date: 06/20/25 Time: 12:28
Sample (adjusted): 2014 2023
Included observations: 10 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
GLSRESID(-1)	-0.559668	0.276452	-2.024467	0.0736

R-squared	0.287290	Mean dependent var	-0.004618
Adjusted R-squared	0.287290	S.D. dependent var	0.025216
S.E. of regression	0.021288	Akaike info criterion	-4.766748
Sum squared resid	0.004078	Schwarz criterion	-4.736489
Log likelihood	24.83374	Hannan-Quinn criter.	-4.799941
Durbin-Watson stat	2.056292		

PENGUJIAN LAG OPTIMAL

VAR Lag Order Selection Criteria
 Endogenous variables: D(X1) D(X2) D(Y)
 Exogenous variables: C
 Date: 06/21/25 Time: 20:39
 Sample: 2012 2023
 Included observations: 10

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	58.78771	NA	2.87e-09	-11.15754	-11.06677	-11.25712
1	75.41269	19.94997*	7.18e-10*	-12.68254*	-12.31944*	-13.08086*

* indicates lag order selected by the criterion
 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)
 FPE: Final prediction error
 AIC: Akaike information criterion
 SC: Schwarz information criterion
 HQ: Hannan-Quinn information criterion

UJI STABILITAS VAR

Uji VAR

Vector Autoregression Estimates
 Date: 06/21/25 Time: 20:50
 Sample (adjusted): 2014 2023
 Included observations: 10 after adjustments
 Standard errors in () & t-statistics in []

	D(X1)	D(X2)	D(Y)
D(X1(-1))	-0.629801 (0.18733) [-3.36204]	-0.004984 (0.11408) [-0.04369]	0.149208 (0.06545) [2.27979]
D(X2(-1))	2.403671 (0.94917) [2.53240]	-0.225921 (0.57804) [-0.39084]	-0.263376 (0.33162) [-0.79422]
D(Y(-1))	-0.737863 (1.09954) [-0.67106]	0.354618 (0.66962) [0.52958]	0.790199 (0.38416) [2.05697]
C	0.095511 (0.02890) [3.30526]	0.004850 (0.01760) [0.27561]	-0.006024 (0.01010) [-0.59667]
R-squared	0.775399	0.055175	0.586514
Adj. R-squared	0.663098	-0.417238	0.379771
Sum sq. resids	0.016884	0.006262	0.002061
S.E. equation	0.053047	0.032306	0.018533
F-statistic	6.904667	0.116793	2.836925

Log likelihood	17.73053	22.68987	28.24654
Akaike AIC	-2.746107	-3.737974	-4.849308
Schwarz SC	-2.625072	-3.616940	-4.728274
Mean dependent	0.068536	0.009776	0.017213
S.D. dependent	0.091392	0.027137	0.023533

Determinant resid covariance (dof adj.)	2.62E-10
Determinant resid covariance	5.65E-11
Log likelihood	75.41269
Akaike information criterion	-12.68254
Schwarz criterion	-12.31944
Number of coefficients	12

Nilai Modulus

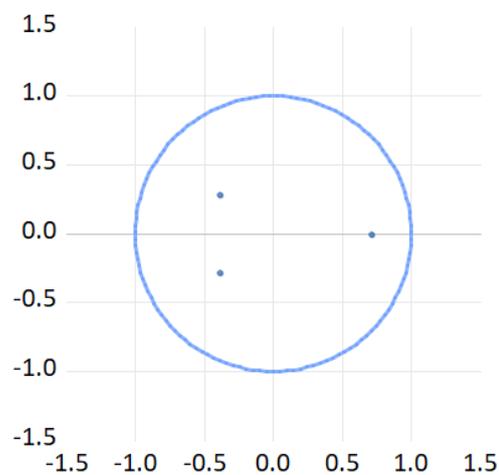
Roots of Characteristic Polynomial
 Endogenous variables: D(X1) D(X2) D(Y)
 Exogenous variables: C
 Lag specification: 1 1
 Date: 06/21/25 Time: 21:05

Root	Modulus
0.709662	0.709662
-0.387592 - 0.285412i	0.481339
-0.387592 + 0.285412i	0.481339

No root lies outside the unit circle.
 VAR satisfies the stability condition.

Gambar Root Polynomial

Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial



UJI KAUSALITAS GRANGER

VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests

Date: 06/22/25 Time: 23:45

Sample: 2012 2023

Included observations: 10

Dependent variable: D(X1)

Excluded	Chi-sq	df	Prob.
D(X2)	6.413068	1	0.0113
D(Y)	0.450326	1	0.5022
All	10.30301	2	0.0058

Dependent variable: D(X2)

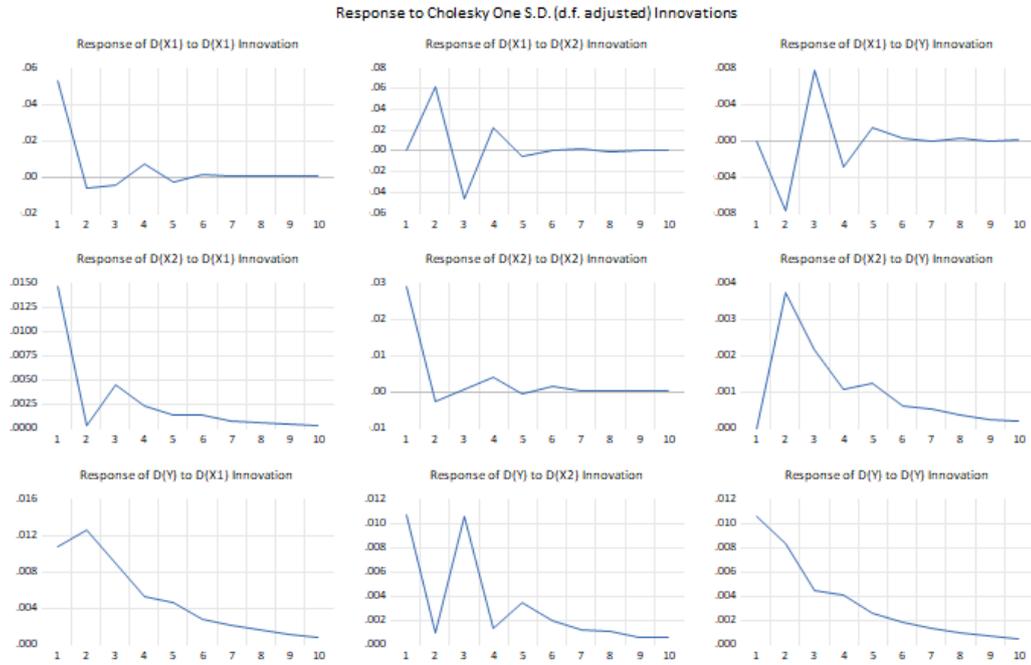
Excluded	Chi-sq	df	Prob.
D(X1)	0.001909	1	0.9652
D(Y)	0.280453	1	0.5964
All	0.350245	2	0.8394

Dependent variable: D(Y)

Excluded	Chi-sq	df	Prob.
D(X1)	5.197450	1	0.0226
D(X2)	0.630778	1	0.4271
All	5.203551	2	0.0741

ANALISIS IRF

Grafik



Tabel

Response of D(X1):

Period	D(X1)	D(X2)	D(Y)
1	0.053047	0.000000	0.000000
2	-0.006386	0.061406	-0.007803
3	-0.004622	-0.045840	0.007762
4	0.006991	0.022557	-0.002993
5	-0.002980	-0.005979	0.001385
6	0.001662	3.76E-05	0.000232
7	9.17E-05	0.001803	-6.64E-05
8	3.31E-05	-0.001089	0.000306
9	0.000300	0.000652	-2.98E-06
10	5.95E-06	-9.31E-05	8.67E-05

Response of D(X2):

Period	D(X1)	D(X2)	D(Y)
1	0.014556	0.028841	0.000000
2	0.000275	-0.002710	0.003750
3	0.004442	0.000620	0.002155
4	0.002190	0.003838	0.001053
5	0.001316	-0.000500	0.001234
6	0.001341	0.001357	0.000609

7	0.000691	0.000383	0.000526
8	0.000598	0.000325	0.000362
9	0.000401	0.000324	0.000244
10	0.000278	0.000145	0.000186

Response of D(Y):

Period	D(X1)	D(X2)	D(Y)
1	0.010794	0.010731	0.010575
2	0.012611	0.000883	0.008356
3	0.008940	0.010574	0.004451
4	0.005205	0.001353	0.004108
5	0.004579	0.003424	0.002522
6	0.002827	0.001945	0.001875
7	0.002129	0.001185	0.001356
8	0.001514	0.001105	0.000923
9	0.001044	0.000625	0.000679
10	0.000764	0.000506	0.000472

Cholesky One S.D. (d.f. adjusted) Innovations
Cholesky ordering: D(X1) D(X2) D(Y)

ANALISIS VD

Tabel

Variance Decomposition of D(X1):

Period	S.E.	D(X1)	D(X2)	D(Y)
1	0.053047	100.0000 (0.00000)	0.000000 (0.00000)	0.000000 (0.00000)
2	0.081770	42.69563 (19.9164)	56.39383 (20.1860)	0.910538 (2.74627)
3	0.094177	32.42807 (20.3641)	66.20617 (20.4900)	1.365758 (3.63784)
4	0.097139	30.99865 (20.8875)	67.62266 (21.2034)	1.378688 (3.88659)
5	0.097378	30.94015 (20.5668)	67.66770 (20.9909)	1.392148 (4.66617)
6	0.097392	30.96007 (20.5463)	67.64763 (21.2698)	1.392304 (4.86800)
7	0.097409	30.94951 (20.4193)	67.65861 (21.1570)	1.391872 (5.51935)
8	0.097416	30.94535 (20.6171)	67.66198 (21.4674)	1.392671 (5.73906)
9	0.097418	30.94462 (20.8449)	67.66279 (21.8163)	1.392596 (6.20061)
10	0.097418	30.94457 (20.9793)	67.66276 (22.2245)	1.392673 (6.32963)

Variance Decomposition of D(X2):

Period	S.E.	D(X1)	D(X2)	D(Y)
--------	------	-------	-------	------

1	0.032306	20.30127 (21.5632)	79.69873 (21.5632)	0.000000 (0.00000)
2	0.032636	19.89889 (20.0479)	78.78089 (20.0094)	1.320223 (4.84134)
3	0.033014	21.25712 (19.7296)	77.02658 (20.0852)	1.716298 (5.04327)
4	0.033325	21.29392 (19.6559)	76.92185 (20.4704)	1.784233 (6.26132)
5	0.033377	21.38243 (19.9819)	76.70231 (21.1978)	1.915258 (7.09269)
6	0.033437	21.46666 (20.2203)	76.59181 (21.6960)	1.941532 (7.92313)
7	0.033451	21.49207 (20.5518)	76.54322 (22.3978)	1.964705 (8.59225)
8	0.033460	21.51263 (20.6317)	76.51199 (22.7870)	1.975381 (9.08693)
9	0.033464	21.52077 (20.7439)	76.49911 (23.2484)	1.980118 (9.56707)
10	0.033466	21.52511 (20.6531)	76.49192 (23.3432)	1.982968 (10.0786)

Variance Decomposition of D(Y):

Period	S.E.	D(X1)	D(X2)	D(Y)
1	0.018533	33.92272 (22.7551)	33.52206 (20.8544)	32.55522 (17.1538)
2	0.023940	48.07973 (20.6645)	20.22648 (17.9706)	31.69379 (16.7186)
3	0.028012	45.30308 (19.3175)	29.02278 (19.3629)	25.67413 (16.4887)
4	0.028818	46.06696 (19.7644)	27.64272 (19.8456)	26.29032 (16.7306)
5	0.029488	46.40959 (19.4954)	27.74930 (19.9532)	25.84111 (16.9371)
6	0.029746	46.51096 (19.7703)	27.69731 (20.7386)	25.79173 (17.0946)
7	0.029876	46.61354 (20.2186)	27.61345 (21.5937)	25.77301 (17.3577)
8	0.029949	46.64226 (20.5563)	27.61517 (22.1964)	25.74258 (17.4426)
9	0.029982	46.66268 (20.8744)	27.59897 (22.8749)	25.73835 (17.6715)
10	0.029999	46.67242 (20.7106)	27.59482 (22.7815)	25.73276 (17.7240)

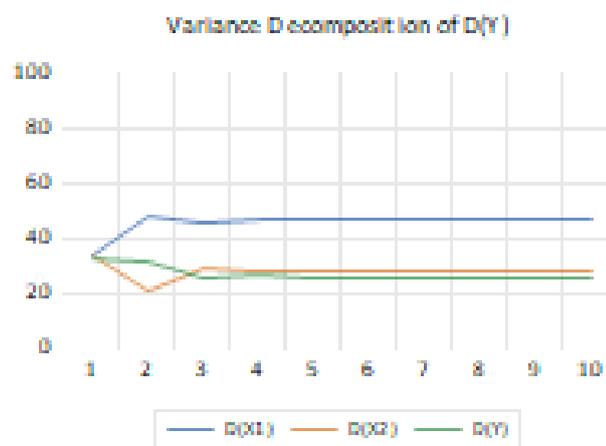
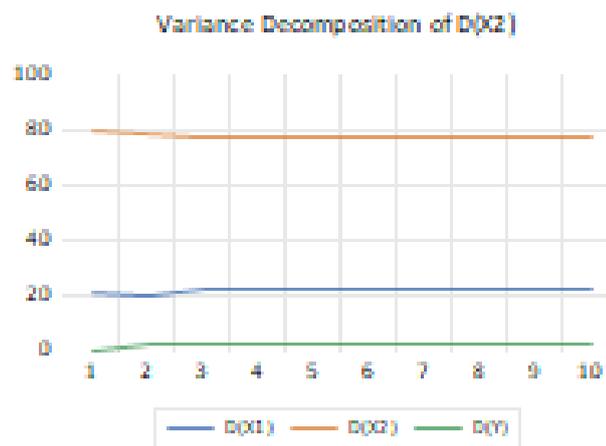
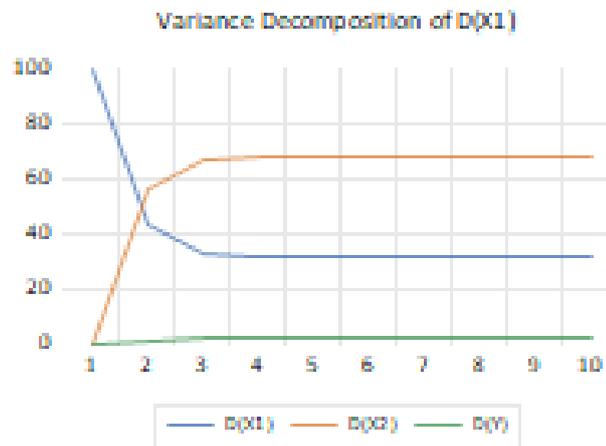
Cholesky One S.D. (d.f. adjusted) Innovations

Cholesky ordering: D(X1) D(X2) D(Y)

Standard errors: Monte Carlo (100 repetitions) standard deviations
in parentheses

Grafik

Variance Decomposition using Cholesky (d.f. adjusted) Factors



Lampiran 3: Surat Bimbingan (SK penunjukan pembimbing)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id, e-mail: iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2744/In.28.3/D.1/TL.00/12/2024 Metro, 6 Desember 2024
Lampiran : -
Perihal : **PEMBIMBING SKRIPSI**

Kepada Yth,
Putri Swastika, M.IF., Ph.D (Dosen Pembimbing Skripsi)
Di-
Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka menyelesaikan studinya, maka kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk membimbing mahasiswa dibawah ini:

Nama : ANI YUSMITASARI
NPM : 2103010007
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah (ESy)
Judul : FLYPAPER EFFECT PADA BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2012-2023

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dosen Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal sampai dengan penulisan skripsi, dengan tugas untuk mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi skripsi Bab I s.d Bab IV
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK Pembimbing Skripsi ditetapkan oleh Fakultas
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah/skripsi yang ditetapkan oleh IAIN Metro
4. Banyaknya halaman skripsi antara 60 s.d 120 halaman dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan \pm 1/6 bagian
 - b. Isi \pm 2/3 bagian
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan FEBI

Putri Swastika

Lampiran 4: Surat Keterangan Bebas Pustaka



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; perpustakaan@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-593/In.28/S/U.1/OT.01/06/2025**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : ANI YUSMITASARI
NPM : 2103010007
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 2103010007.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 19 Juni 2025
Kepala Perpustakaan,

Aan Gunoni, S.I.Pust.
NIP. 19920428 201903 1 009



Lampiran 5: Surat Uji Plagiasi Turnitin



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Ani Yusmitasari
NPM : 2103010007
Jurusan : Ekonomi Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Flypaper Effect Pada Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012-2023** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi **Turnitin** dengan **Score 20%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 24 Juni 2025
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah



Muhammad Mujib Baidhowi, M.E.
NIP. 199103112020121005

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama **Ani Yusmitasari**, lahir di Sumbergede 3 Februari tahun 2003. Peneliti merupakan anak ke-tiga dari tiga bersaudara dan merupakan anak dari pasangan Bapak **Amirul** dan Ibu **Waginem**.

Peneliti memulai pendidikannya di TK Haritama, kemudian melanjutkan pendidikan di sekolah dasar yang bertempat di SD Negeri 2 Wonokarto. Setelah menempuh pendidikan sekolah dasar selama 6 tahun, penulis melanjutkan pendidikannya ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Sekampung, dan melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah di SMA Negeri 1 Sekampung. Setelah menyelesaikan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), penulis melanjutkan untuk mengemban pendidikan ilmu perguruan tinggi. Terhitung mulai tahun 2021, tercatat sebagai mahasiswi jurusan Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT, dan disertai doa kedua orang tua dalam menjalani aktivitas Akademik diperguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung, Alhamdulillah peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir dengan Skripsi yang berjudul “*Flypaper Effect* Pada Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012-2023” dengan baik.